



TANTANGAN DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Disajikan oleh: Ir. NUR BERLIAN, MSE

Kepala Bidang Inovasi dan Penelitian Aktual Strategis,

Mewakili Ir. Totok Suprayitno, Ph.D., Kepala Balitbang Kemendikbud

Pada acara:

Disemeniasi Hasil Studi SMERU tentang Peran Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) pada Peningkatan Pengetahuan dan Praktik Mengajar Guru

Kebumen, 30 April 2019

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

BALITBANG, KEMENDIKBUD



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

01

TANTANGAN



Jumlah satuan pendidikan terus meningkat untuk menampung siswa yang jumlahnya terus meningkat

Jumlah Sekolah, Siswa, dan Guru Tahun Ajaran 2014/2015-2016/2017 (tidak termasuk madrasah)

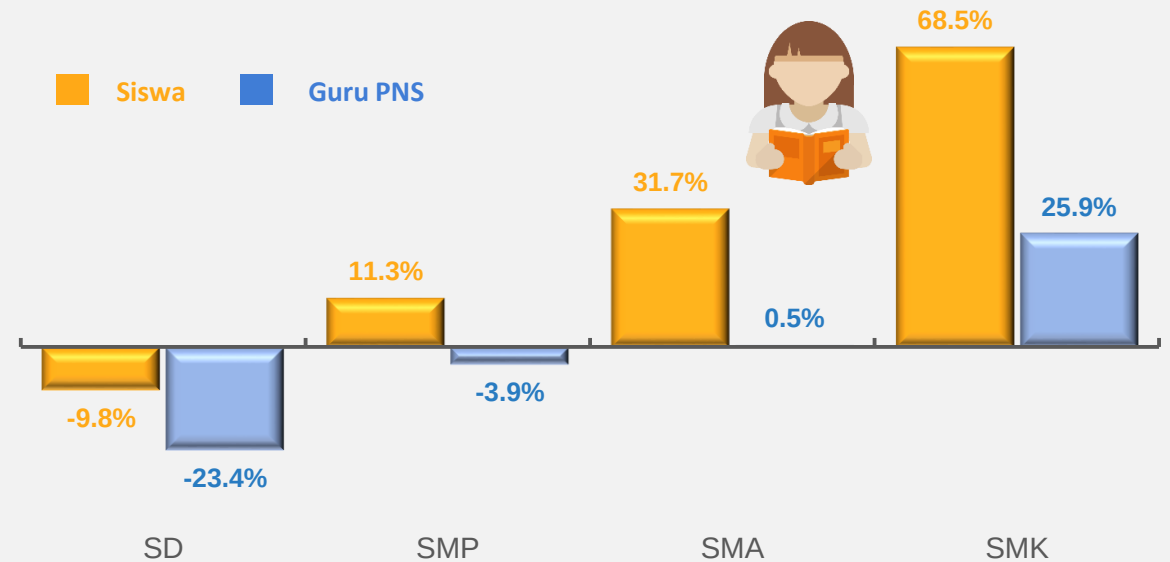
No	Jenjang	Satuan Pendidikan			Siswa		
		2014/15	2015/16	2016/17	2014/15	2015/16	2016/17
1	Paud Non Formal	108,570	103,960	105,005	7,367,231	7,684,246	8,027,829
2	TK	79,368	85,499	88,381	4,358,225	4,495,432	4,605,809
3	SLB	2,023	1,962	2,070	109,594	114,085	121,244
4	SD	147,513	147,536	147,503	26,132,141	25,885,053	25,618,078
5	SMP	36,518	37,023	37,763	9,930,647	10,040,277	10,145,416
6	SMA	12,513	12,689	13,144	4,232,572	4,312,407	4,659,542
7	SMK	12,421	12,659	13,236	4,211,245	4,334,987	4,682,913
Jumlah Total		398,926	401,328	407,102	56,341,655	56,866,487	57,860,831

Sumber: PDSPK Kemendikbud, 2014/2015 -2016/2017



Isu ketersediaan guru: Pertumbuhan jumlah sekolah dan siswa tidak disertai dengan pemenuhan gurunya

- Untuk jenjang SMP, SMA dan SMK, pertumbuhan jumlah guru di sekolah negeri dari tahun ajaran 2009/10 sampai 2016/17 jauh di bawah pertumbuhan jumlah siswa.
- Bahkan untuk jenjang SD, **jumlah guru PNS menurun 2 kali lipat** dari penurunan jumlah siswa.

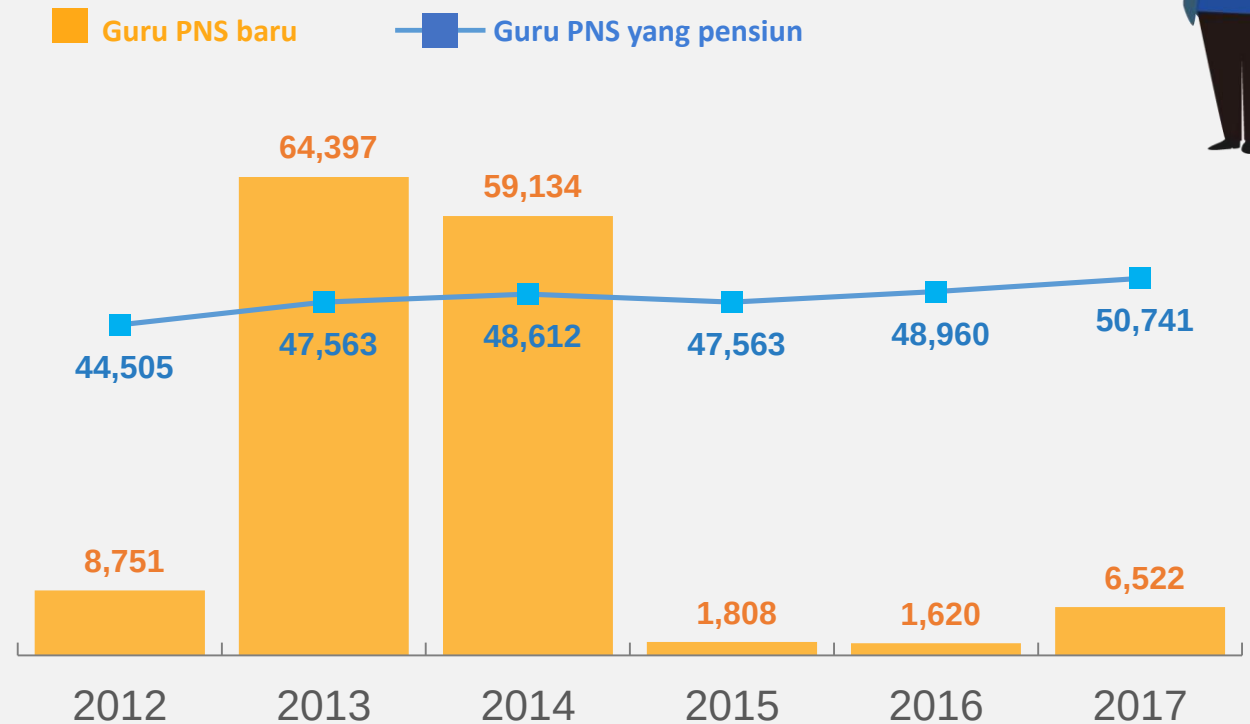


- ➔ Sekolah merekrut sendiri guru non-PNS tanpa proses seleksi yang jelas.
- ➔ 35% guru di sekolah negeri adalah guru Non-PNS

Jumlah guru PNS yang direkrut jauh lebih rendah daripada yang pensiun.



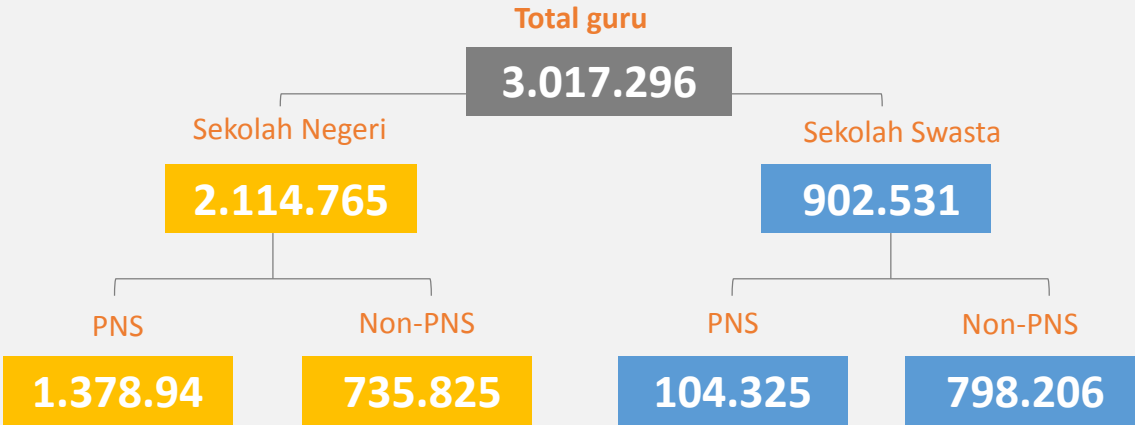
Perbandingan jumlah guru PNS yang pensiun dengan guru PNS baru yang direkrut



Sekilas, rasio **guru:murid** kita nampak ideal.

	SD	SMP	SM
Indonesia	17	16	16
India	33	30	31
Tiongkok	16	12	16
Jepang	11	13	17
Belanda	15	14	12

Namun, **35%** dari total guru di sekolah negeri adalah non-PNS



Sehingga, rasio **guru PNS:murid** di sekolah negeri sebenarnya jauh lebih tinggi.

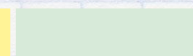
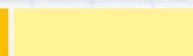
Guru PNS:murid sekolah negeri



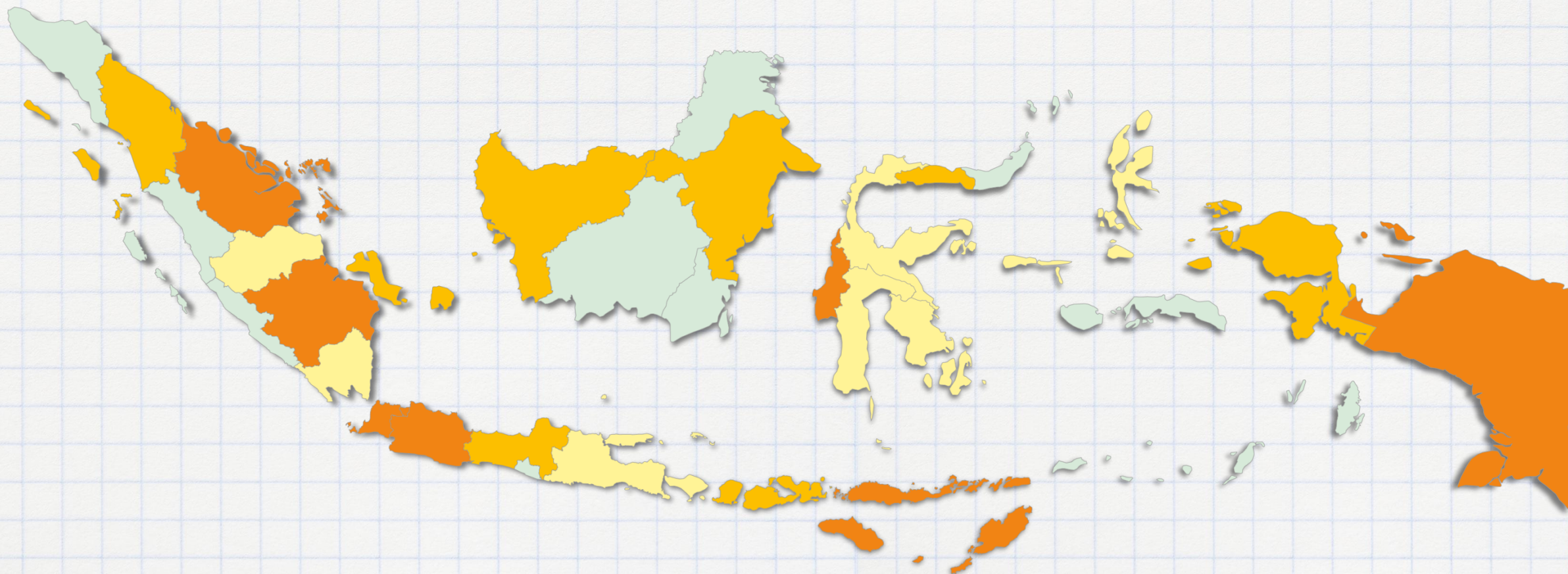
Ditambah lagi, persebaran guru PNS tidak merata.

Rasio guru PNS:siswa sekolah negeri

25% tertinggi



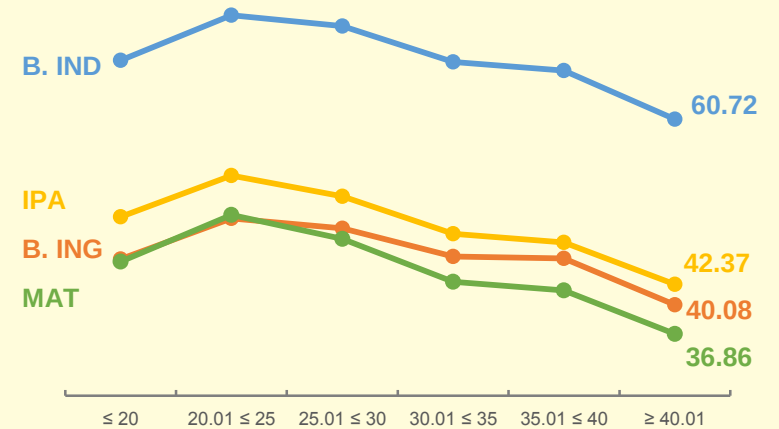
25% terendah



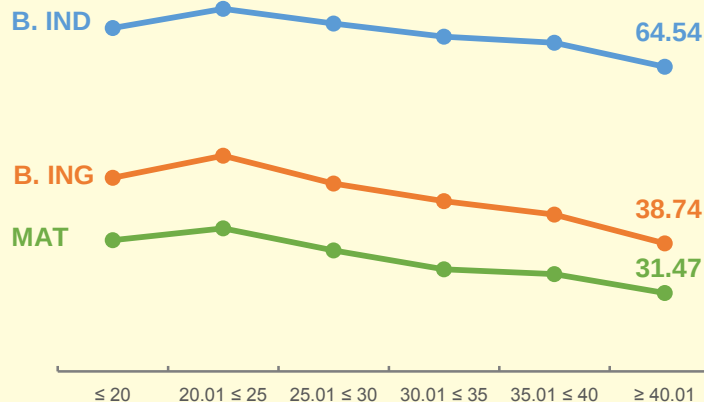
Semakin baik rasio guru PNS:murid sekolah negeri, cenderung semakin baik juga hasil belajar siswanya.

Y: Nilai UN
X: Rasio guru PNS:murid di sekolah negeri

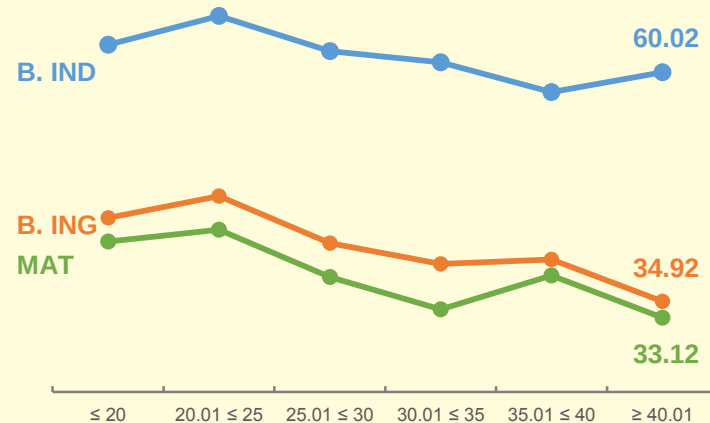
SMP



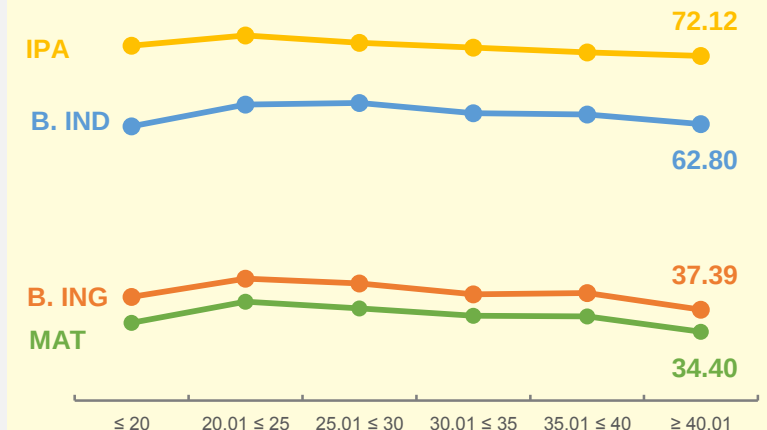
SMA jurusan IPA



SMA jurusan IPS



SMK

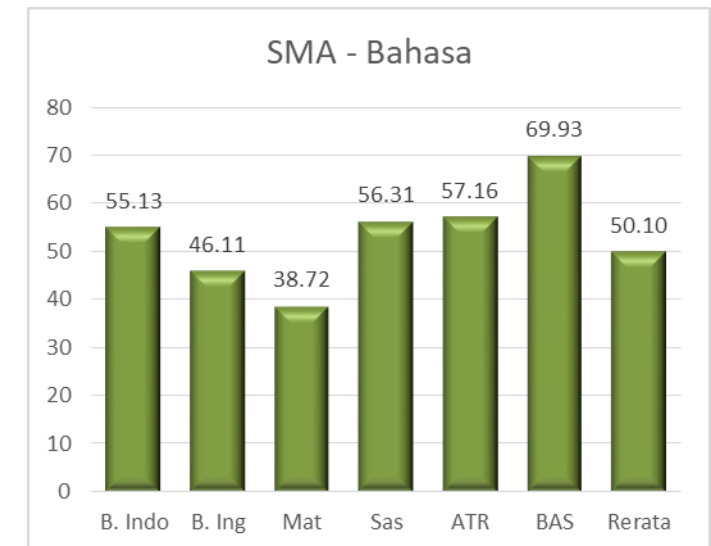
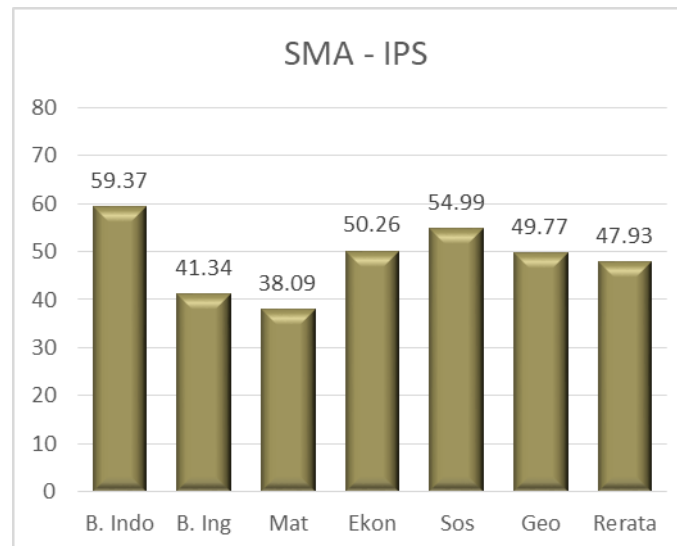
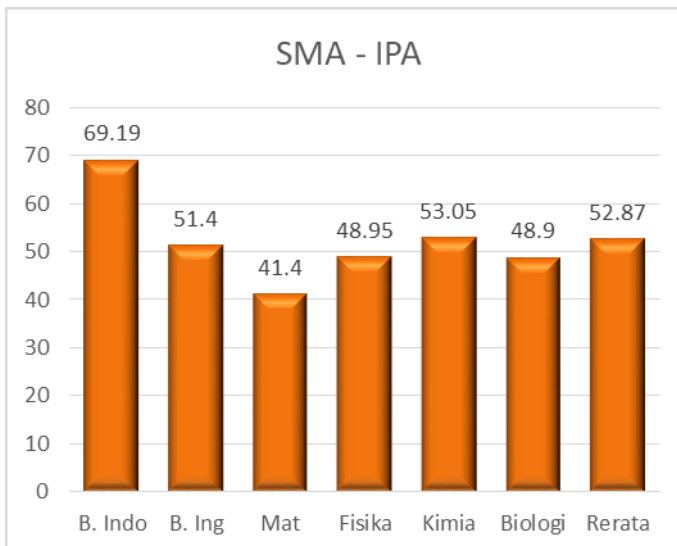
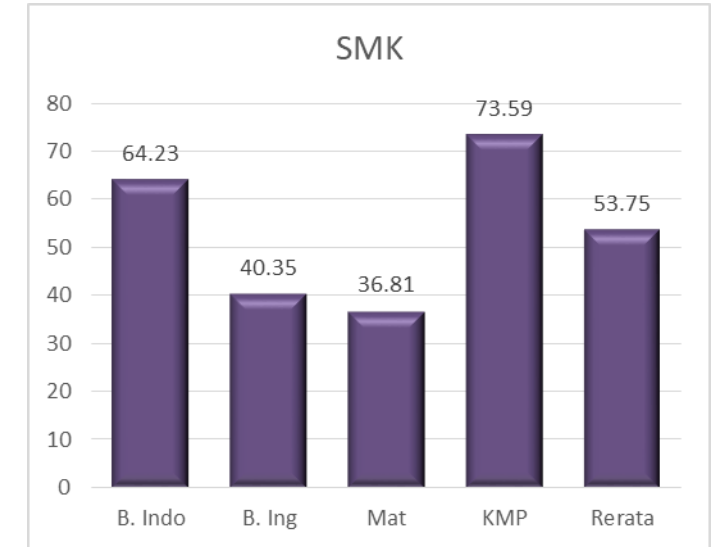
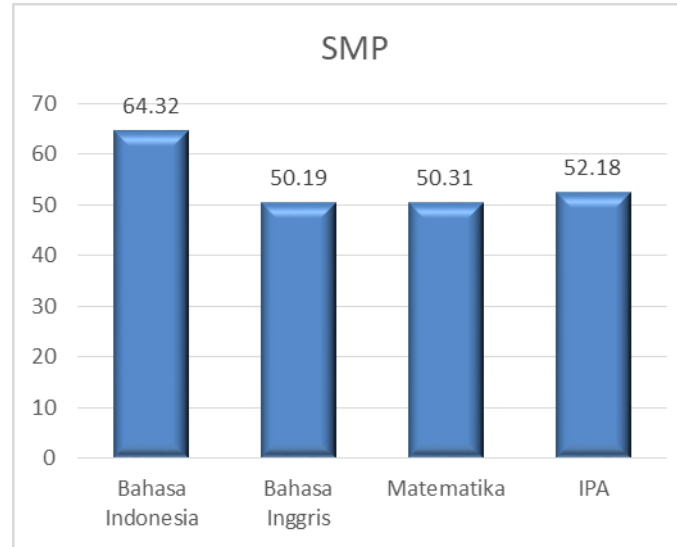


Catatan; dihitung menggunakan data di sekolah dengan UNBK



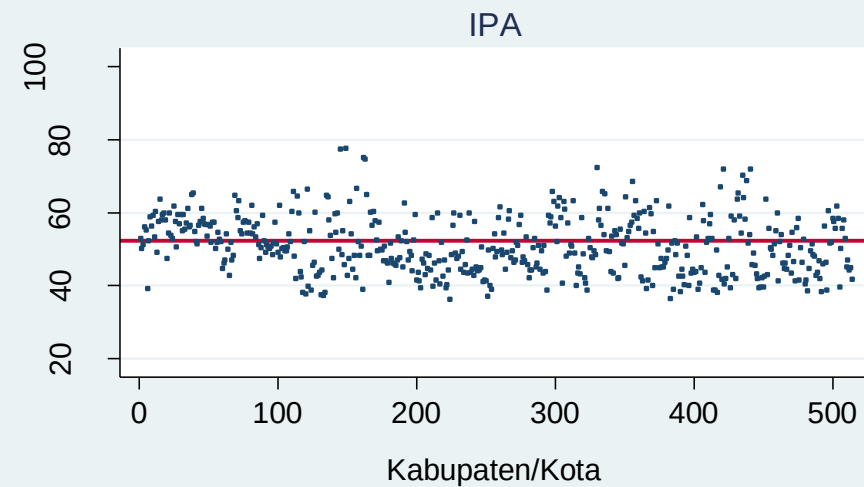
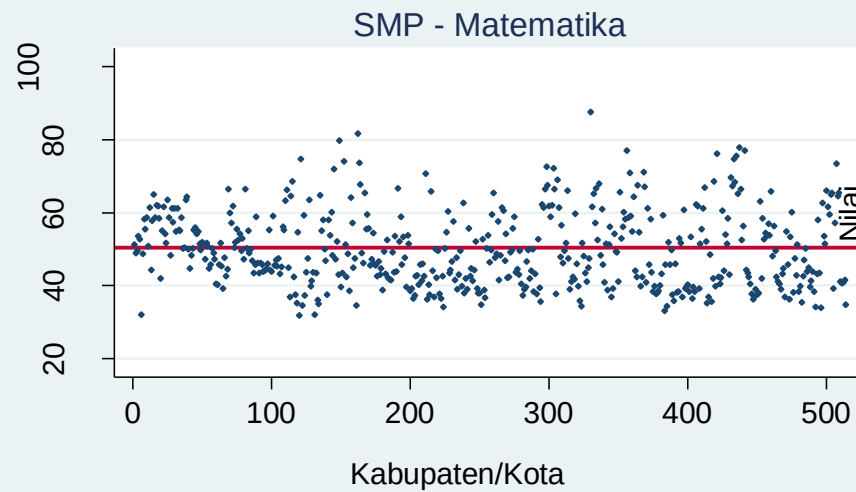
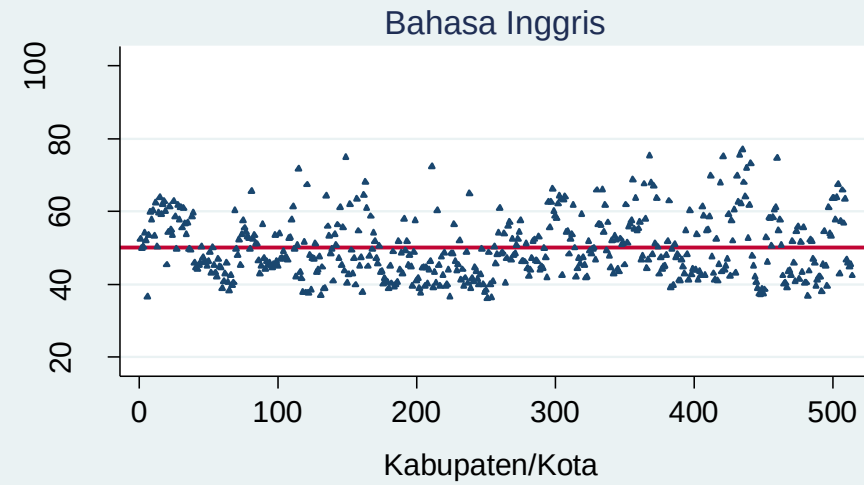
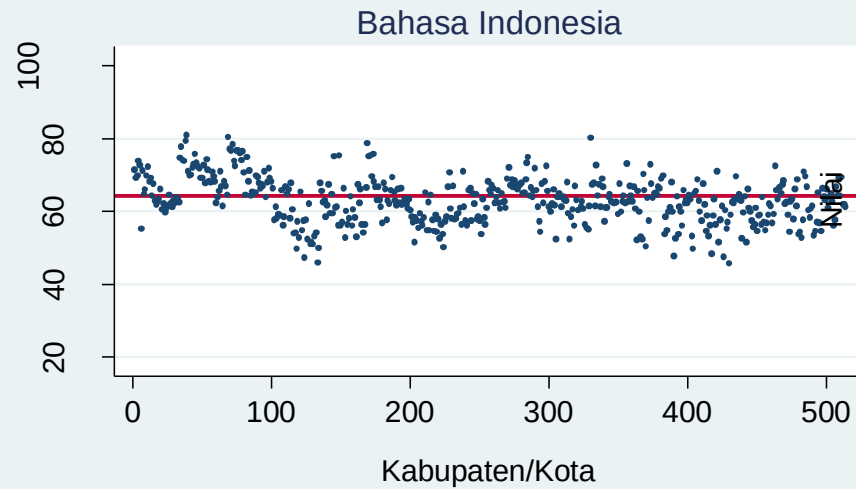
Mutu pembelajaran juga belum baik, antara lain dilihat dari hasil Ujian Nasional

- Hasil belajar siswa secara rata-rata masih cukup rendah
- Variasi hasil belajar juga cukup lebar antar sekolah dan antar daerah

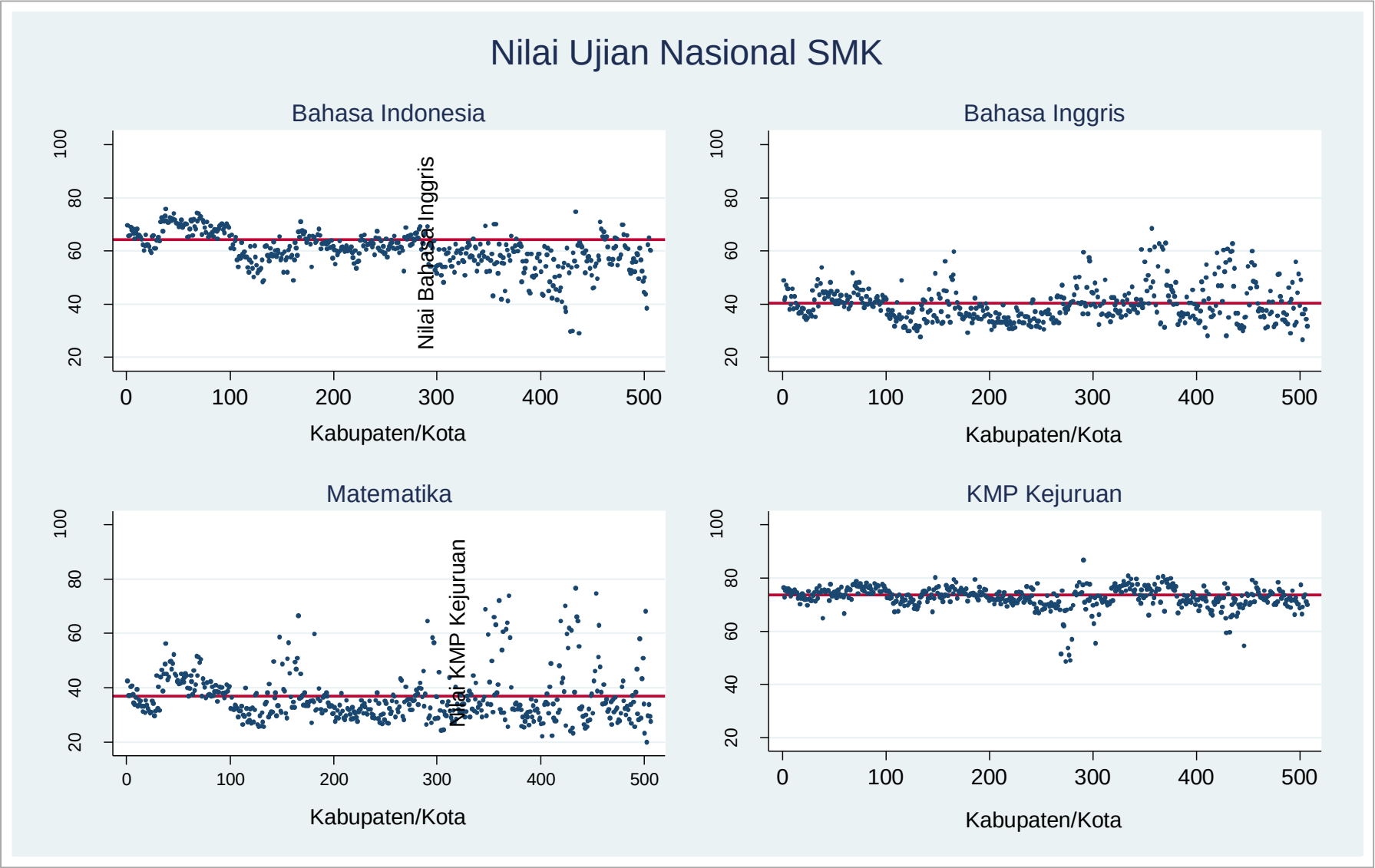


Persebaran Nilai Ujian Nasional Tahun 2017 antar Kab/Kota untuk Jenjang SMP

Nilai Ujian Nasional SMP



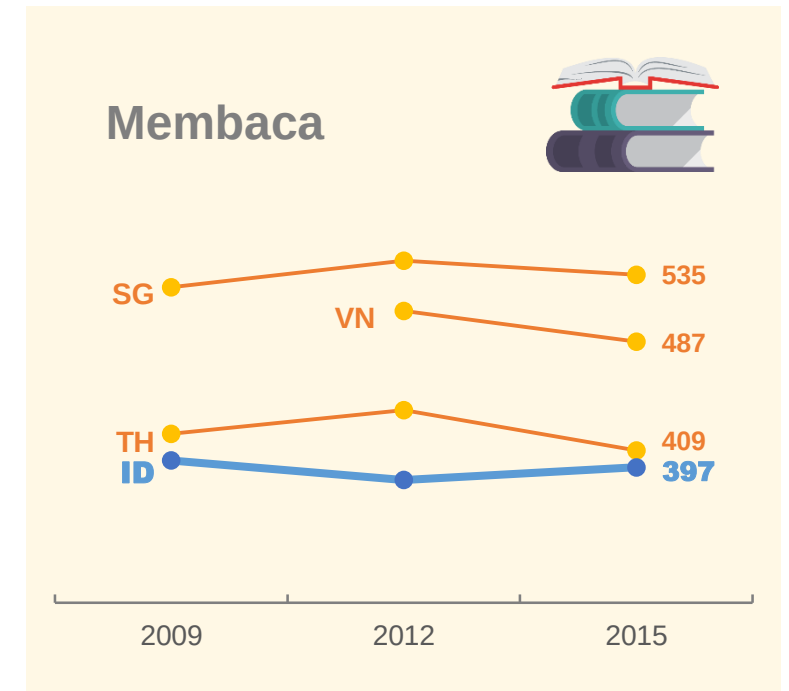
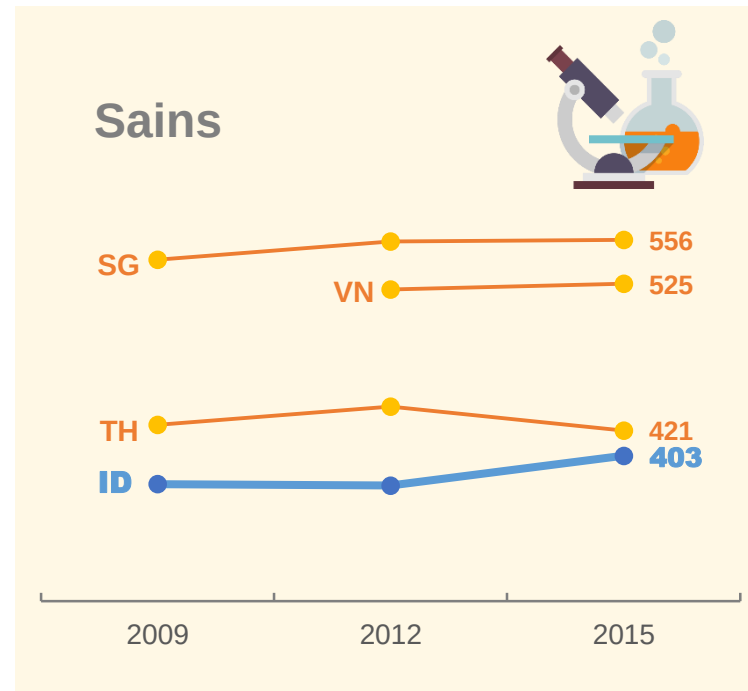
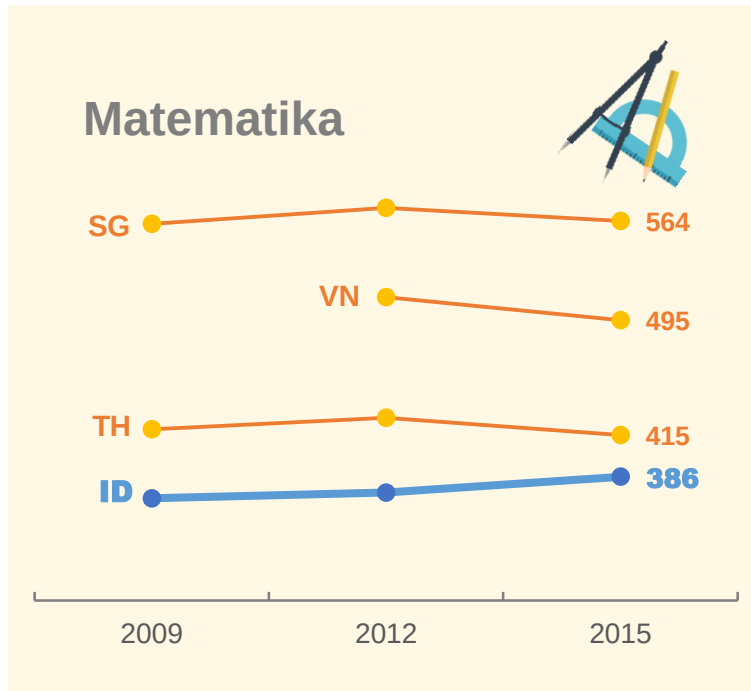
Persebaran Nilai Ujian Nasional Tahun 2017 Antar Kab/Kota untuk Jenjang SMK





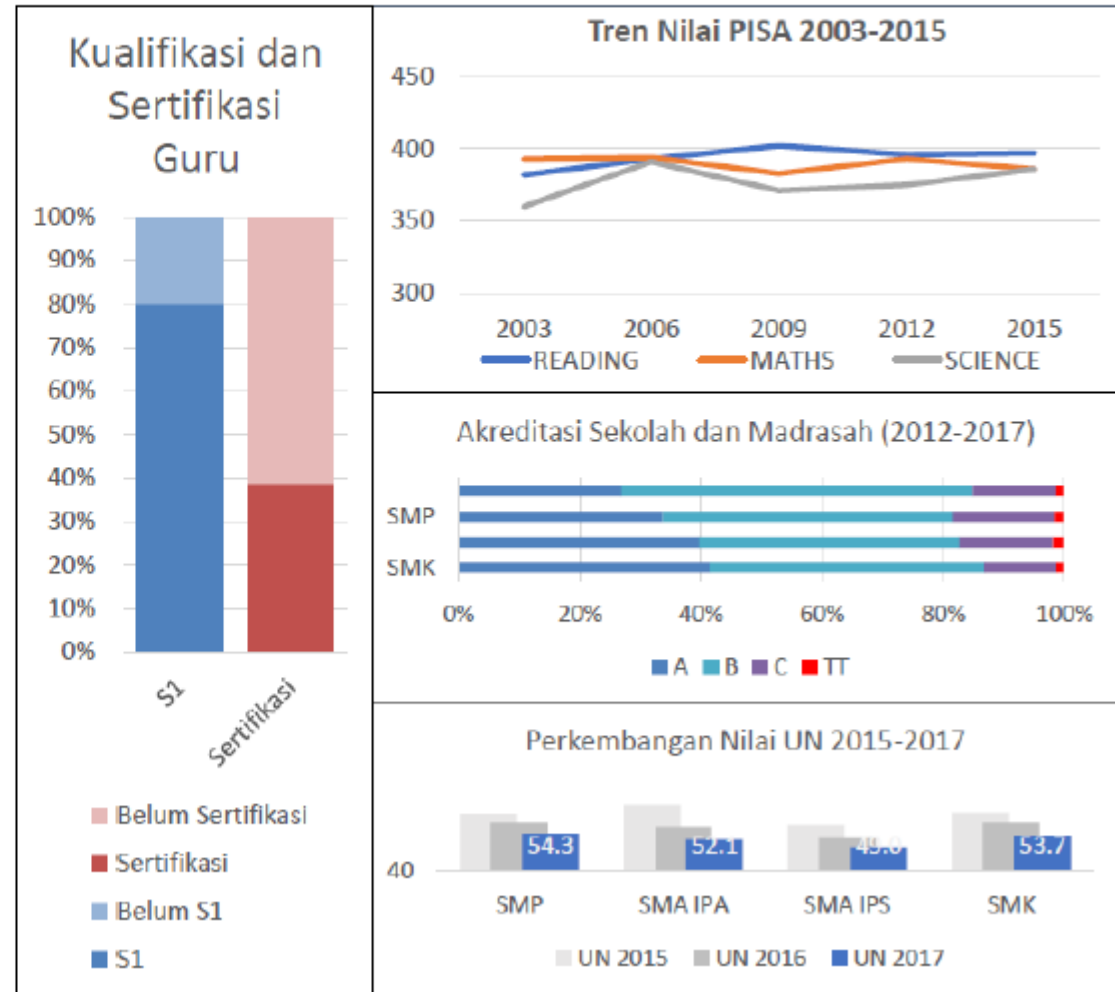
Begitu juga jika dilihat dari penilaian internasional seperti PISA, meskipun terdapat peningkatan, hasil siswa Indonesia masih lebih rendah dari kinerja siswa negara-negara tetangga

Skor PISA Indonesia 2009, 2012, dan 2015 vs beberapa negara ASEAN

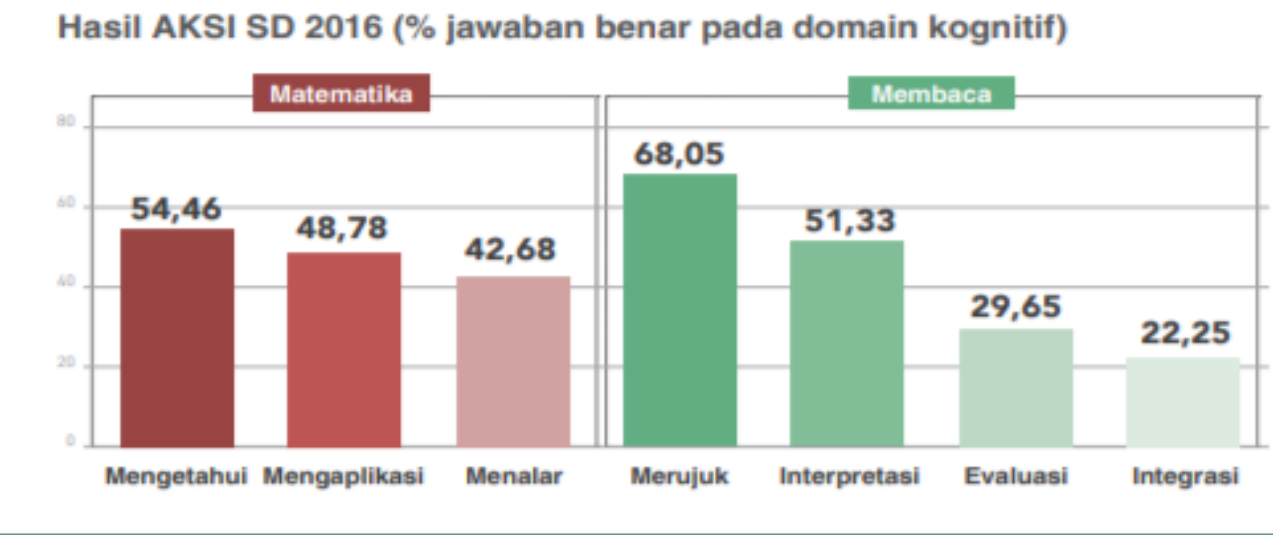
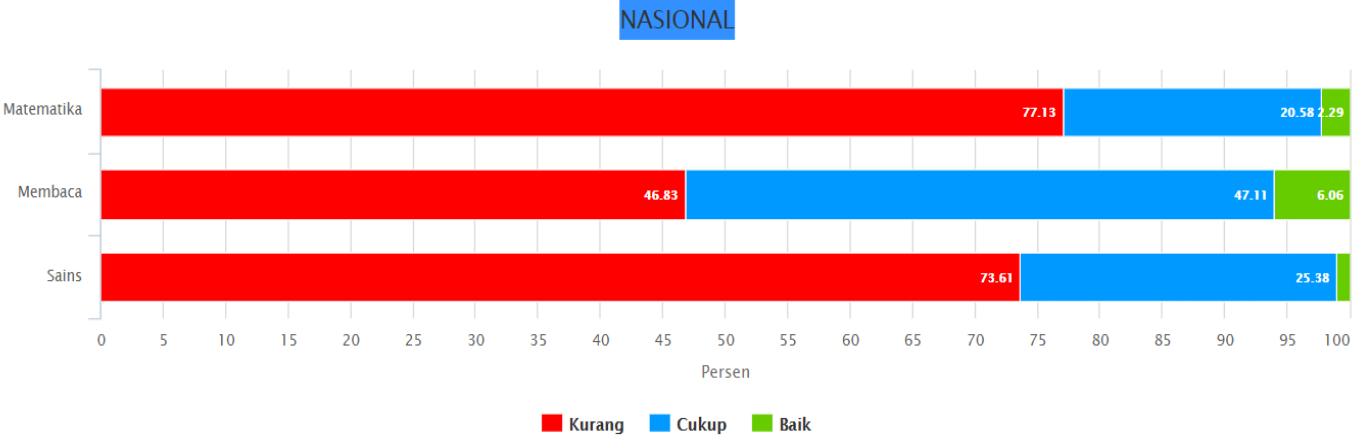


Pertumbuhan Mutu Pendidikan masih Belum Optimal

- **Hasil belajar siswa** Indonesia seperti ditunjukkan oleh hasil PISA, TIMMS, UN dan AKSI masih kurang dan tidak ada peningkatan yang signifikan selama 10 tahun terakhir
- Investasi yang dikucurkan untuk meningkatkan mutu guru masih belum menunjukkan hasilnya
- **Sistem akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan belum** menunjukkan dampak pada peningkatan mutu pembelajaran



Hasil Asesmen Kinerja Siswa Indonesia (AKSI) Tahun 2016

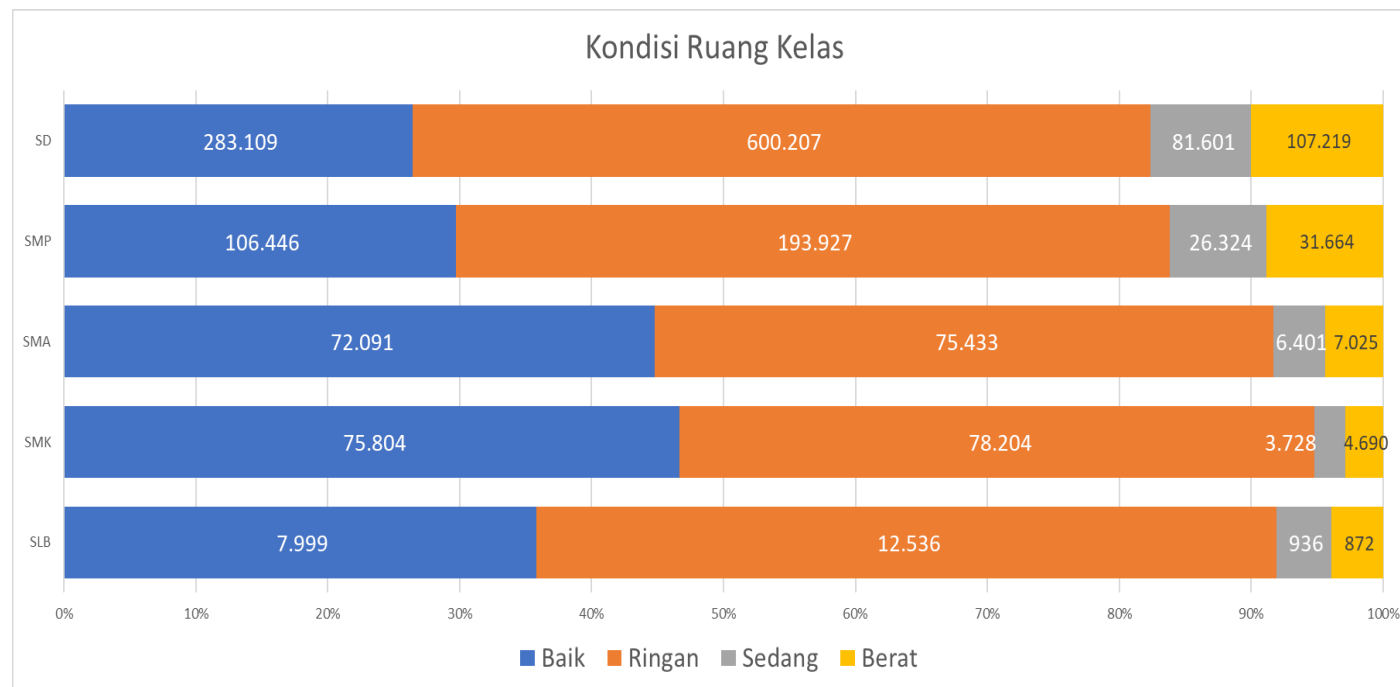


AKSI adalah penilaian terhadap siswa Kelas-4 SD menggunakan pendekatan yang digunakan dalam PISA



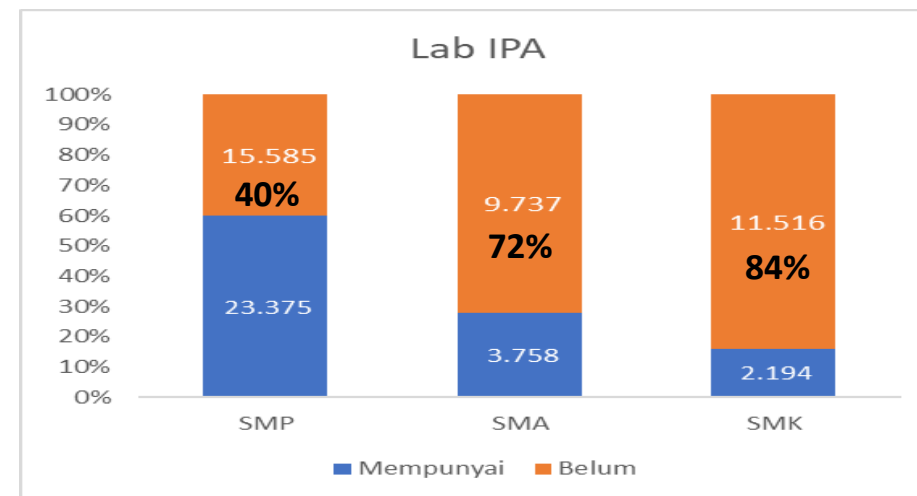
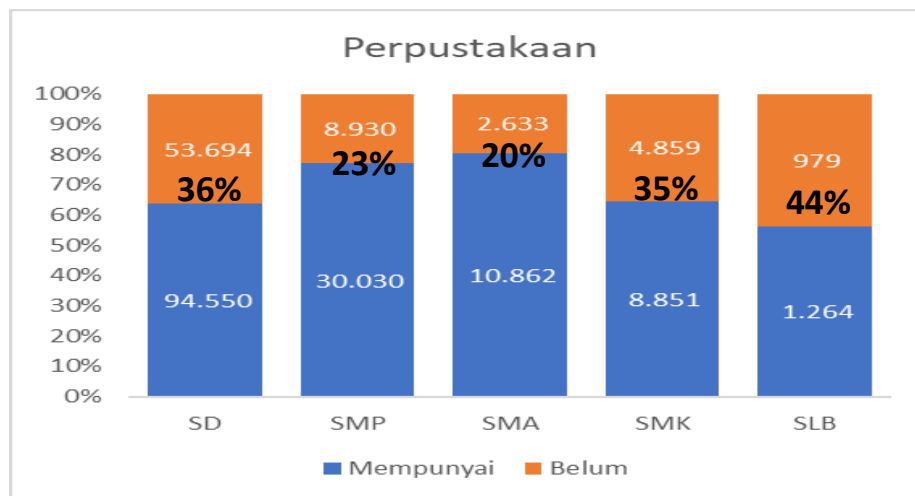
Fasilitas pendidikan juga belum sepenuhnya baik

- Intervensi yang sudah dilakukan melalui DAK Fisik sejak tahun 2003 belum mampu menyelesaikan masalah kerusakan sekolah.
- Fasilitas pendukung peningkatan mutu juga belum sepenuhnya tersedia

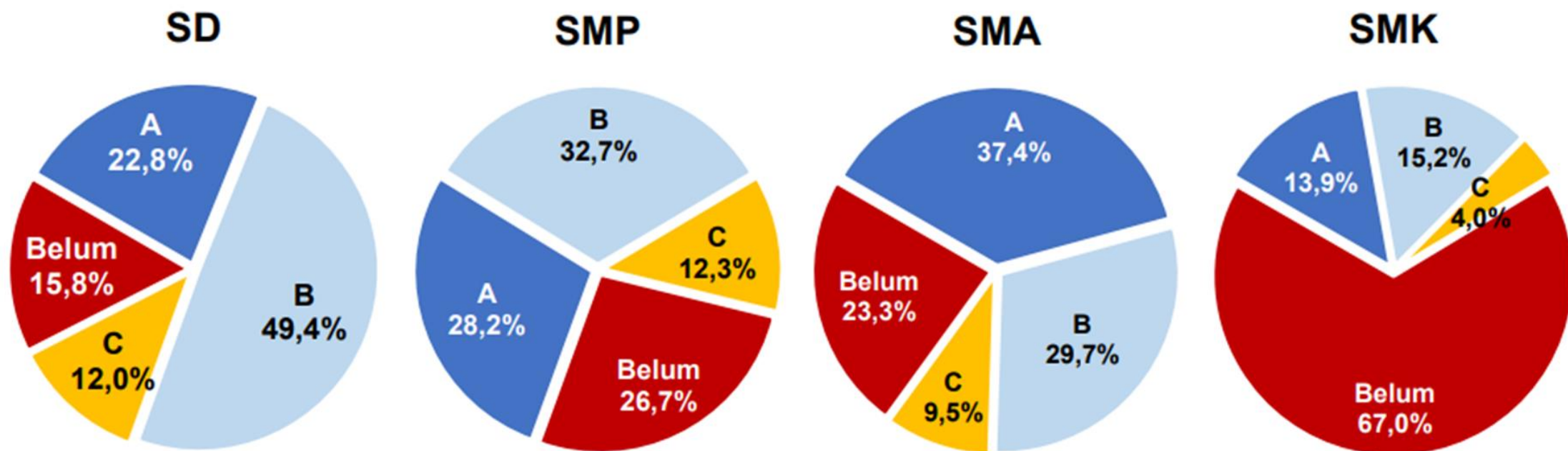


Total rusak Sedang = 118.990 ruang

Total rusak Berat = 151.470 ruang

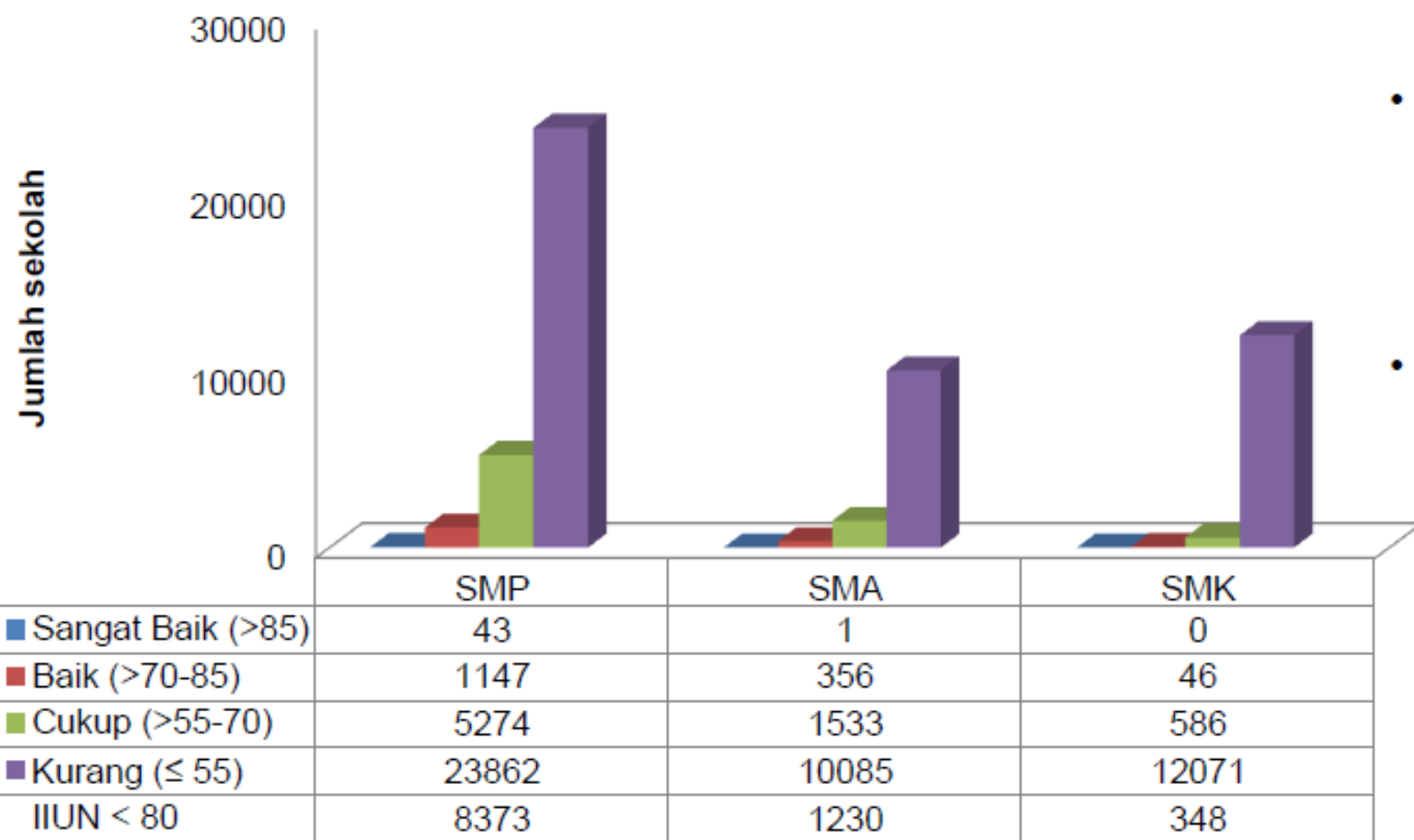


➡ Masih banyak sekolah yang terakreditasi C dan bahkan yang belum terakreditasi



Sumber: Badan Akreditasi Nasional, Desember 2017

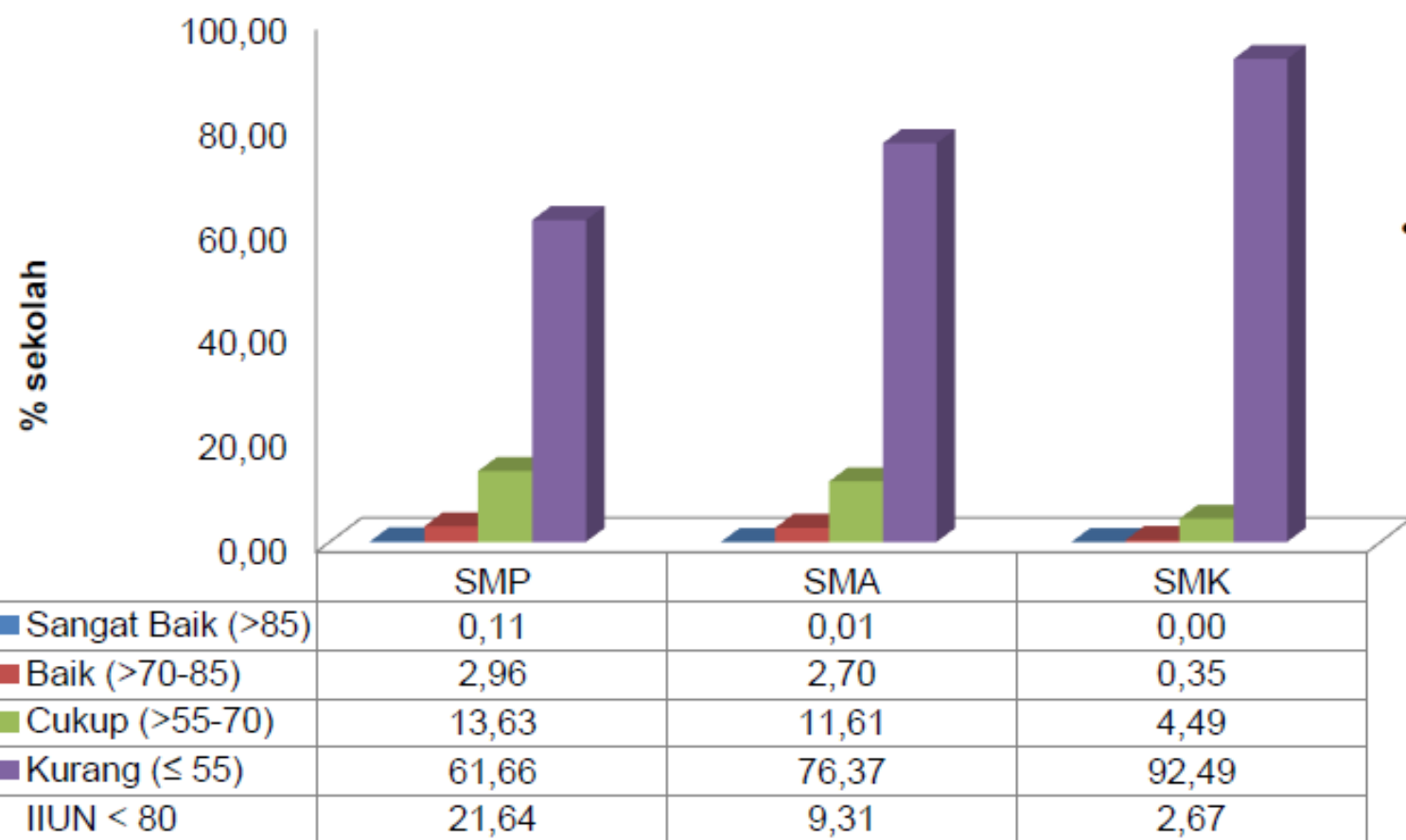
Kategori Sekolah Berdasarkan Hasil UN 2018



- Pada semua jenjang pendidikan, sekolah dengan kategori **sangat baik** masing-masing SMP: 43 dan SMA:1 sekolah.
- Sekolah pada kategori **kurang** sangat dominan pada semua jenjang pendidikan.

- Data disusun berdasarkan hasil UN pada sekolah dengan integritas tinggi
- Kategori adalah kategori tingkat pencapaian kompetensi lulusan.

Persentase Kategori Sekolah Berdasarkan Hasil UN 2018



- Pada semua jenjang pendidikan, sekolah dengan kategori **sangat baik** kurang dari **1%**
- Kategori **kurang** pada masing-masing jenjang adalah:
 - SMP: 61,66%
 - SMA: 76,37%
 - SMK: 92,49%



02

STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Penilaian sebagai Penggerak Mutu Pembelajaran



Strategi Intervensi Pemerintah

Kategori Sekolah	Kondisi Umum	Intervensi
Kurang ke Cukup	1. Guru belum kompeten 2. Sekolah belum memenuhi standar minimum	1. Peningkatan kompetensi guru 2. Guru dibimbing dalam pembelajaran (disediakan resep jadi) 3. Pemenuhan standar pelayanan minimum
Cukup ke Baik	Standar telah tercapai, namun performa belum mantap	1. Penguatan capaian/performa siswa dan guru 2. Peningkatan akuntabilitas guru dan sekolah 3. Penguatan tata kelola (pendanaan, kelembagaan) 4. Pengembangan model-model pembelajaran
Baik ke Sangat Baik	Performa telah mantap, sistem peningkatan mutu berjalan	1. Pengembangan profesionalisme guru 2. Perluasan otonomi dalam tata kelola dan pembelajaran 3. Pemberian dorongan untuk melakukan inovasi

Bagaimana Hasil UN dapat Menjadi **Refleksi** untuk Penguatan Pembelajaran?

Tailored Training: One Size Doesn't Fit All

SMP A		
No Urut	Cakupan Materi	Skor
1	Bilangan	81.29
2	Aljabar	69.35
3	Geometri dan Pengukuran	71.72
4	Statistika dan Peluang	82.95

SMP B		
No Urut	Cakupan Materi	Skor
1	Bilangan	61.12
2	Aljabar	53.46
3	Geometri dan Pengukuran	61.25
4	Statistika dan Peluang	70.10

SMP C		
No Urut	Cakupan Materi	Skor
1	Bilangan	61.79
2	Aljabar	43.96
3	Geometri dan Pengukuran	54.29
4	Statistika dan Peluang	65.71

Contoh penggunaan rapor mutu soal UN berdasarkan **cakupan materi**:

- Pada mata pelajaran matematika, dari tiga sekolah tersebut, skor Aljabar dan Geometri di dua sekolah cenderung rendah (SMP B dan SMP C).
- Untuk membantu penguatan pembelajaran Aljabar dan Geometri di dua sekolah tersebut, *peer teaching* dapat dilakukan melalui forum profesional guru.
- Guru di SMP A dapat **didorong untuk melakukan *peer teaching* atau berbagai praktik baik** dalam pembelajaran Aljabar dan Geometri di SMP B dan SMP C.

Bagaimana Hasil UN dapat Menjadi **Refleksi** untuk Penguatan Pembelajaran?

SMP A				
Cakupan Materi: 4- Statistika dan Peluang				68.12
36	3.1,IX/1; 3.11,IX	Menentukan median dr n buah data tidak berurutan ($15 < n < 20$)		81.77
37	3.1,IX/1; 3.11,IX	Menentukan rata-rata nilai data yang lain jika rata-rata nilai n data keseluruhan dan rata-rata nilai data seorang		51.04
38	3.2,IX/1; 3.11,IX	Menentukan jumlah data tertentu jika unsur yang diperlukan diketahui		80.73
39	3.2,IX/1; 3.11,IX	Menentukan frekuensi batang yang belum diketahui, jika jumlah semua data ditentukan		89.58
40	4.1,IX/1; 3.10,IX	Menentukan peluang terambilnya bola bernomor genap/ganjil/prima pada pengambilan bola		37.50

SMP B				
Cakupan Materi: 4- Statistika dan Peluang				73.90
36	3.1,IX/1; 3.11,IX	Menentukan median dr n buah data tidak berurutan ($15 < n < 20$)		85.79
37	3.1,IX/1; 3.11,IX	Menentukan rata-rata nilai data yang lain jika rata-rata nilai n data keseluruhan dan rata-rata nilai data seorang		45.79
38	3.2,IX/1; 3.11,IX	Menentukan jumlah data tertentu jika unsur yang diperlukan diketahui		87.37
39	3.2,IX/1; 3.11,IX	Menentukan frekuensi batang yang belum diketahui, jika jumlah semua data ditentukan		93.16
40	4.1,IX/1; 3.10,IX	Menentukan peluang terambilnya bola bernomor genap/ganjil/prima pada pengambilan bola		57.37

Contoh penggunaan rapor mutu soal UN berdasarkan indikator level soal:

- Meskipun kedua sekolah tersebut memiliki kategori baik dalam cakupan materi Statistika dan Peluang, namun memiliki kelemahan indikator level yang berbeda.
- SMP A memerlukan penguatan pada indikator 37 dan 40, sedangkan SMP B memerlukan penguatan pada indikator 37.

Bagaimana Hasil UN dapat Menjadi **Refleksi** untuk Penguatan Pembelajaran?

SMP A		
No Urut	Cakupan Materi	Sekolah
1	Membaca Nonsastra	57.57
2	Membaca Sastra	66.31
3	Menulis Terbatas	70.16
4	Menyunting Kata, Kalimat, Paragraf	58.03
5	Menyunting Ejaan dan Tanda Baca	54.42
SMP B		
No Urut	Cakupan Materi	Sekolah
1	Membaca Nonsastra	61.80
2	Membaca Sastra	61.60
3	Menulis Terbatas	77.75
4	Menyunting Kata, Kalimat, Paragraf	53.83
5	Menyunting Ejaan dan Tanda Baca	55.20
SMP C		
No Urut	Cakupan Materi	Sekolah
1	Membaca Nonsastra	54.15
2	Membaca Sastra	64.45
3	Menulis Terbatas	66.39
4	Menyunting Kata, Kalimat, Paragraf	55.37
5	Menyunting Ejaan dan Tanda Baca	52.44

Rerata Kabupaten/Kota		
No Urut	Cakupan Materi	Kab/Kota
1	Membaca Nonsastra	69.30
2	Membaca Sastra	73.57
3	Menulis Terbatas	78.40
4	Menyunting Kata, Kalimat, Paragraf	70.54
5	Menyunting Ejaan dan Tanda Baca	70.07

Contoh penggunaan rapor mutu soal UN berdasarkan **rata-rata nilai kabupaten/kota**:

- Perlu **dilakukan pemetaan kebutuhan penguatan kemampuan** secara cermat karena setiap sekolah memiliki kebutuhan yang spesifik.
- Untuk membantu pemetaan kebutuhan, Kabupaten/Kota **dapat menggunakan nilai ambang batas yang lebih tinggi** jika rerata Kabupaten/Kota sudah melampaui skor 55.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN STANDAR KOMPETENSI Guru, dan Tenaga Kependidikan



Kompetensi

Kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi

Pasal 10 UU14/2005 Guru & Dosen

Kompetensi Kepala Sekolah

1. kepribadian,
2. sosial,
3. **supervisi,**
4. **manajerial, dan**
5. **kewirausahaan**

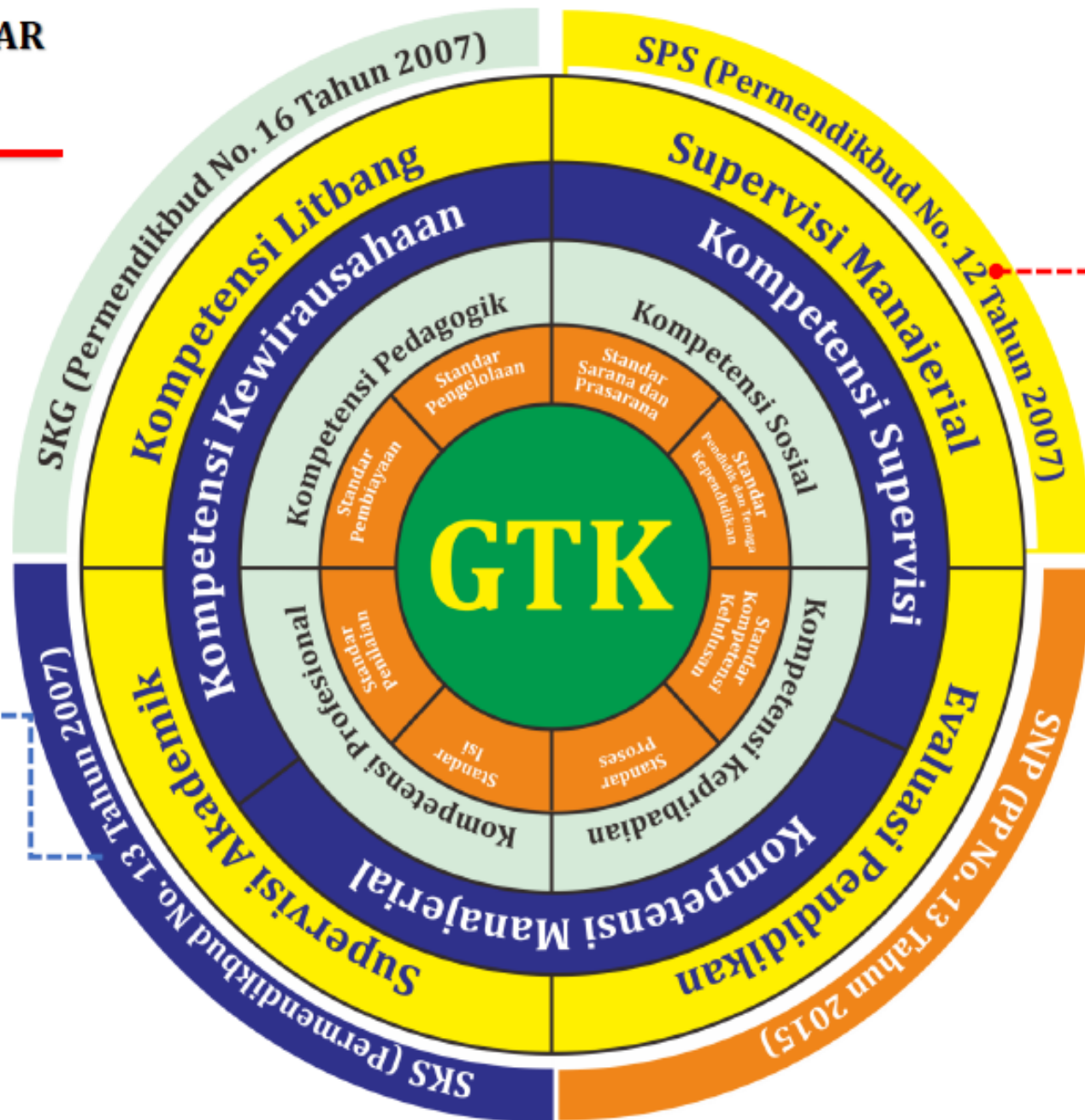
Permendiknas
No.13 Th 2007 ttg
Standar Kepala
Sekolah / Madrasah

Kompetensi Pengawas Sekolah

1. kepribadian,
2. sosial,
3. **supervisi akademik,**
4. **supervisi manajerial,**
5. **penelitian dan pengembangan, dan**
6. **evaluasi pendidikan**

Permendiknas
No.12 Th 2007 ttg
Standar Pengawas
Sekolah / Madrasah

4/10/2019



Ditjen GTK Kemdikbud 2018



BEBAN KERJA GURU

Mencakup kegiatan pokok:

Merencanakan pembelajaran
atau pembimbingan

Membimbing dan
melatih peserta didik

Melaksanakan **TUGAS
TAMBAHAN** yang
melekat pada kegiatan
pokok guru

Melaksanakan
pembelajaran
atau pembimbingan

Minimal **24 JTM**
Maksimal **40 JTM**

Bagian dari total
37,5 jam
per minggu

Menilai hasil
pembelajaran atau
pembimbingan

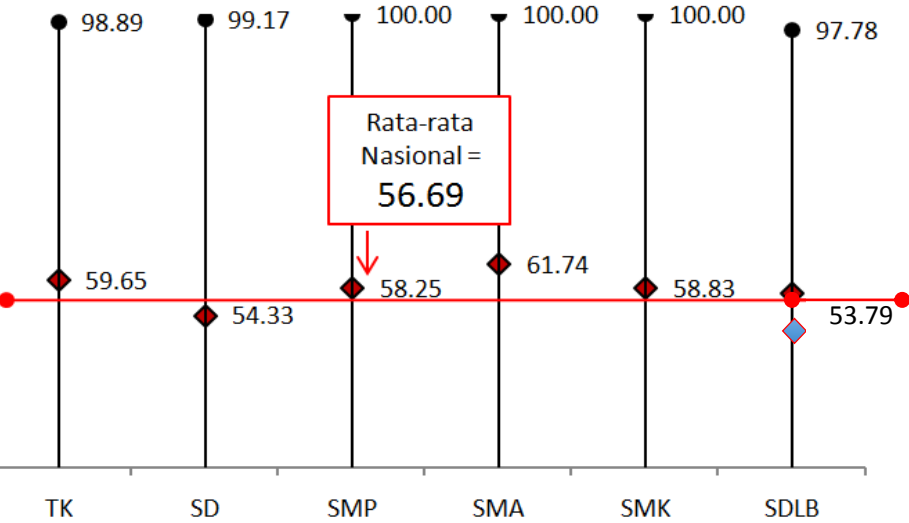
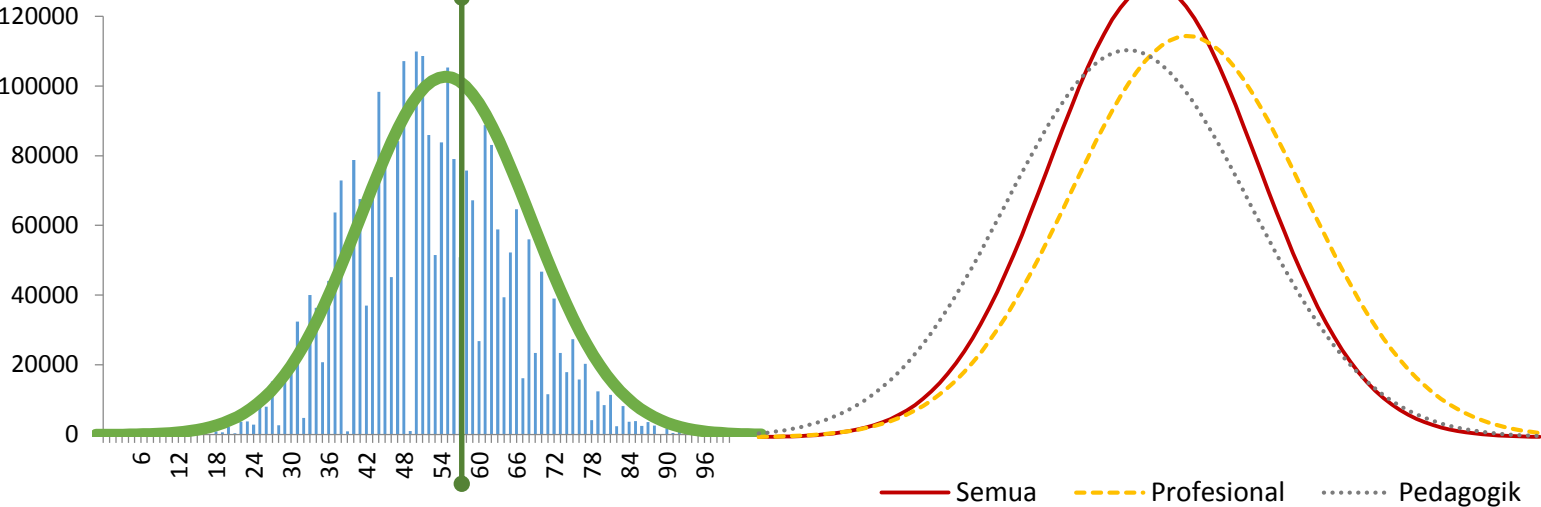


1. Wakasek (*ekuivalensi: 12 JTM*)
2. Kepala program keahlian (*ekuivalensi : 12 JTM*)
3. Kepala Perpustakaan (*ekuivalensi : 12 JTM*)
4. Kepala lab, bengkel, atau unit produksi (*ekuivalensi : 12 JTM*)
5. Pembimbing khusus (*ekuivalensi : 6 JTM*)
6. **Tugas tambahan lain** yang terkait pendidikan di sekolah (maksimal *ekuivalensi: 6 JTM*)

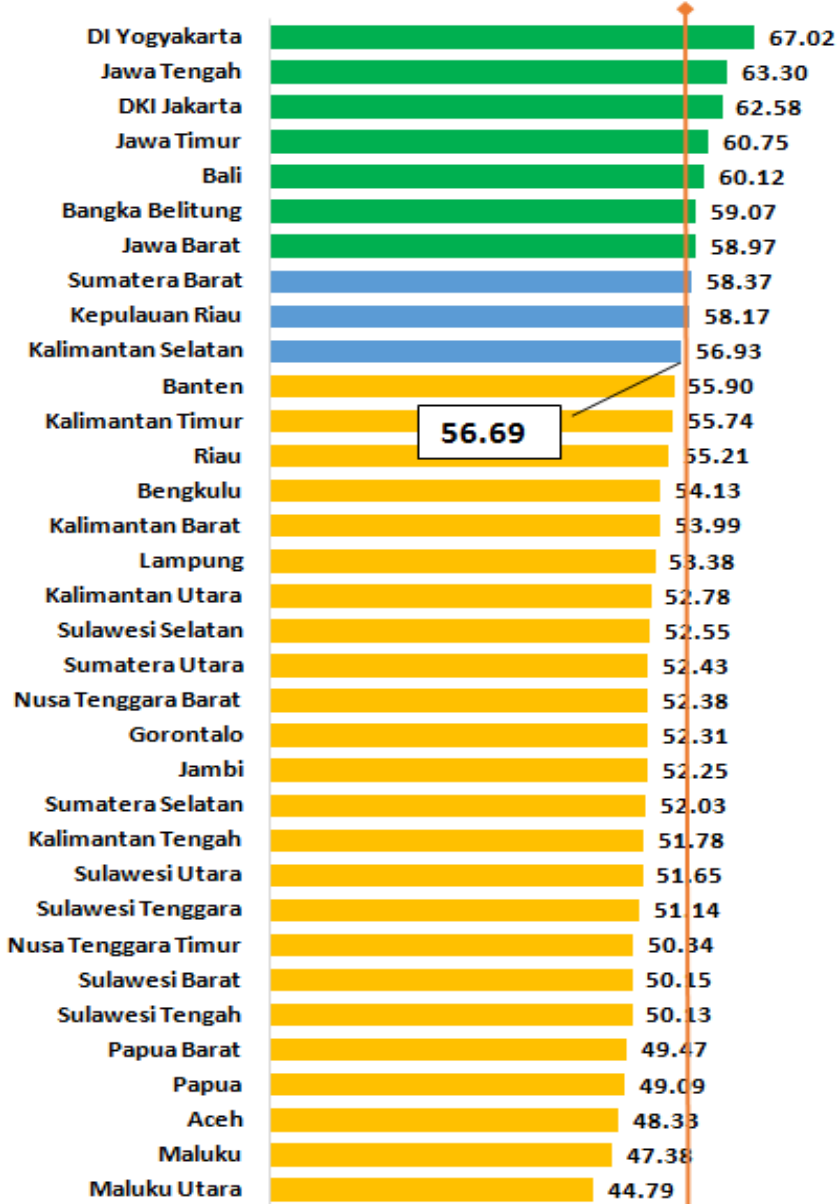
Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Permendikbud No. 15/2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepsek dan Pengawas Sekolah

HASIL UJI KOMPETENSI GURU – Kompetensi Pedagogik Lebih Tertinggal Dibanding Kompetensi Profesional

Rata-rata = 56.69

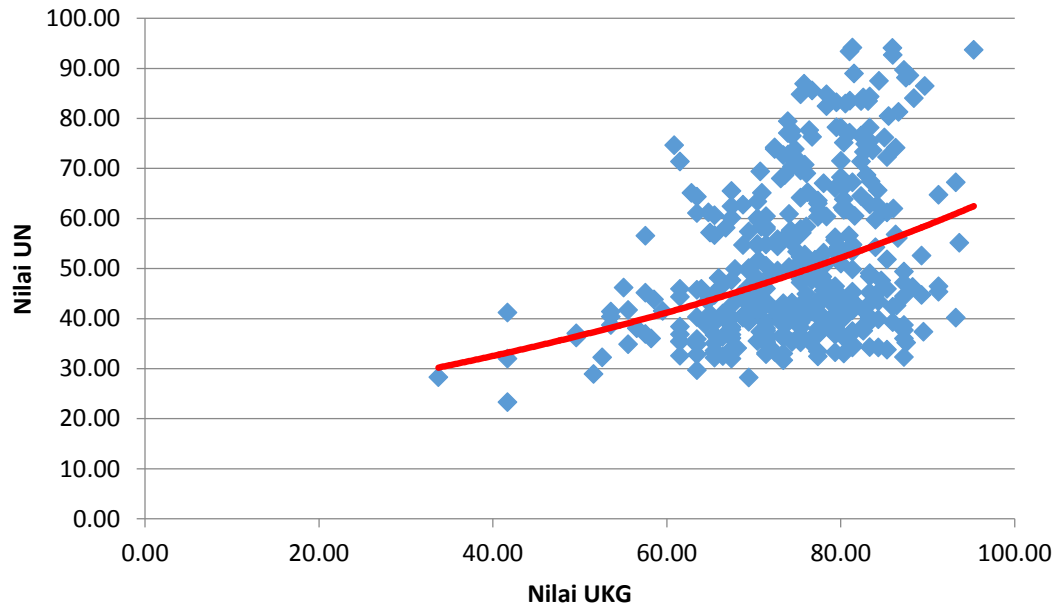


UKG	
Maks	100.00
Min	10.00
Rata	56.69
Stdev	12.67
N	2,699,516



Pengaruh Nilai UKG Terhadap Nilai UN (DIY)

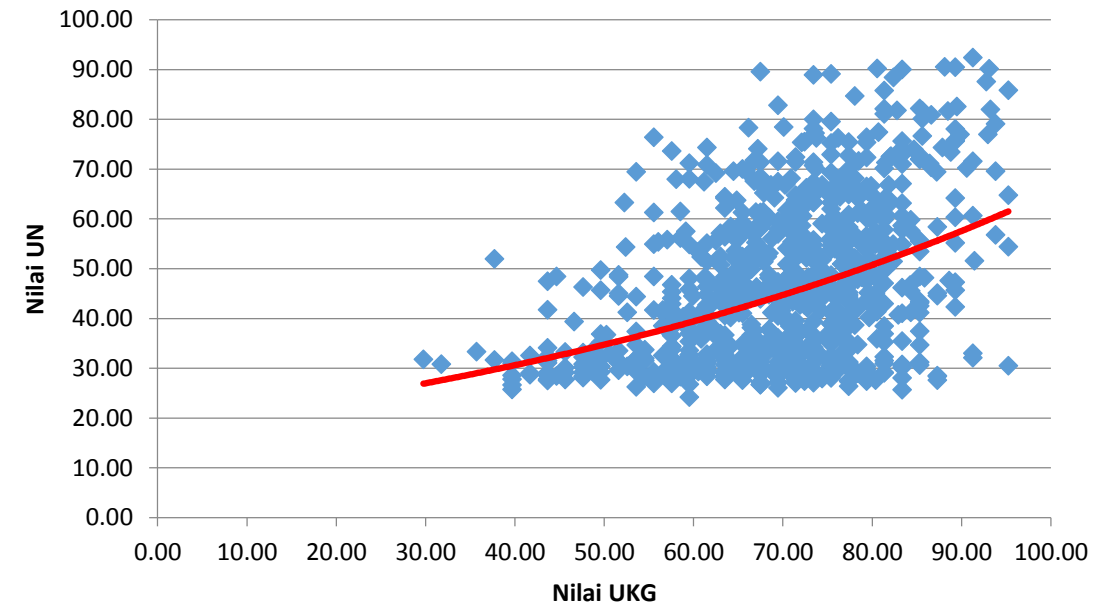
Mapel : Matematika



◆ Nilai UN — Expon. (Nilai UN)

Pengaruh Nilai UKG Terhadap Nilai UN (DKI)

Mapel : Matematika



◆ Nilai UN — Expon. (Nilai UN)

Kesimpulan

Guru Dengan Nilai UKG Tinggi Akan Membuka Peluang Adanya Siswa Dengan Nilai UN Tinggi

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan (1/4)

Strategi	Langkah
Pemerataan dan Peningkatan Kompetensi Guru	• Mendorong daerah untuk melakukan redistribusi guru secara lebih merata dan memastikan rekrutmen guru dilakukan secara regular sesuai dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan. • Menerapkan multi-subjects dan multi-grades teaching untuk meningkatkan ketersediaan guru dengan tetap memegang prinsip efisiensi. • Mengembangkan komunitas pembelajar profesional (<i>Professional Learning Community</i>) untuk menyediakan proses pengembangan profesi guru yang berkelanjutan dan berbasis antar-rekan-sejawat (<i>peer-learning</i>) di tingkat zona melalui antara lain Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah, pertukaran guru antar daerah,serta pengiriman guru untuk mengikukti pelatihan di luar negeri. • Memastikan akses terhadap pembiayaan di luar APBN seperti: pembiayaan oleh daerah, pihak ke-3 (seperti: Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, CSR) ataupun dari dana BOS dan TPG dapat digunakan.
Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan	• Memastikan semua zona memiliki fasilitas pendidikan yang berkualitas. • Memungkinkan pemanfaatan sumberdaya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu zona (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya). • Memastikan intervensi memperhitungkan situasi di setiap zona dan setiap satuan pendidikan. • Menerapkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja. • Memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan. • Memadukan seluruh sumberdaya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap zona.

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan (2/4)

Strategi	Langkah
Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi	• Mengembangkan mekanisme untuk mendorong penyediaan materi pengembangan kompetensi guru dan media/alat bantu mengajar yang bermutu dan terstandar. • Menggunakan media internet untuk membuka akses guru terhadap materi tersebut. • Menyediakan gawai yang sudah diisi dengan materi yang sama (<i>preloaded</i>) untuk mendukung guru di daerah dengan keterbatasan jaringan internet. • Menggunakan gawai untuk merekam praktik mengajar untuk mendorong <i>peer-review</i> praktik guru di tingkat zona dan juga berbagi praktik yang baik antar guru.
Penguatan penjaminan mutu	• Menyesuaikan dan merampingkan standar nasional pendidikan untuk lebih berfokus pada peningkatan proses pembelajaran di ruang kelas serta indikator kinerja dan akuntabilitas guru. • Mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan (internal dan eksternal) yang berpusat pada keunggulan sekolah (<i>school excellence</i>) dan menggunakan data akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi diri guru/sekolah dan hasil belajar siswa (<i>formative assessment</i>), untuk mengidentifikasi langkah-langkah peningkatan mutu pembelajaran. • Memperkuat peran dan pola pikir kelembagaan yang ada (LPMP, Dinas Pendidikan) dalam peningkatan mutu pendidikan. • Mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti AKSI, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru. • Meningkatkan kapasitas tenaga pendidikan di sekolah untuk memperoleh informasi diagnostik guna meningkatkan pembelajaran dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti UN.

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan (3/4)

Strategi	Langkah
Penguatan Proses Pembelajaran	• Mendorong guru untuk mengubah strategi pembelajaran yang berlandaskan paradigma pengajaran (<i>teaching</i>) menjadi strategi pembelajaran kreatif berlandaskan paradigma pembelajaran (<i>learning</i>), berpusat pada peserta didik dan mendorong peserta didik untuk saling berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi, • Memastikan guru menyiapkan rencana pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta didik (normal, remedial, dan pengayaan). • Mengembangkan kurikulum di semua jenjang dan jalur pendidikan yang dapat didiversifikasi melalui adopsi, adaptasi atau disesuaikan oleh satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan, konteks dan karakteristik daerah. • Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan penguatan dan pendampingan pada satuan pendidikan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan; • Pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.
Penguatan <i>instructional leadership</i>	• Memperkuat peran Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah sebagai pemimpin pedagogi, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah. • Mengembangkan kompetensi kepala dan pengawas sekolah dalam peran mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap guru.

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan (4/4)

Strategi	Langkah
Penguatan Kemampuan Literasi dan Numerasi	• Melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu yang lebih besar untuk pengembangan ketrampilan dasar. • Mengembangkan strategi penguatan pembelajaran numerasi secara menyeluruh (kelas 1-12). • Mengembangkan kompetensi guru yang berfokus pada kompetensi mengajar literasi dan numerasi di kelas awal (1-3 SD/MI). • Menyediakan modul pelatihan serta penyediaan sumber bacaan. • Memperkuat sistem dan mekanisme penyediaan dukungan dan ketersediaan sumber daya bagi guru yang mengajarkan literasi dan numerasi di kelas awal.

PENYIAPAN GTK PROFESIONAL

Penyiapan guru:

Guru baru atau guru sudah bertugas (**input**)

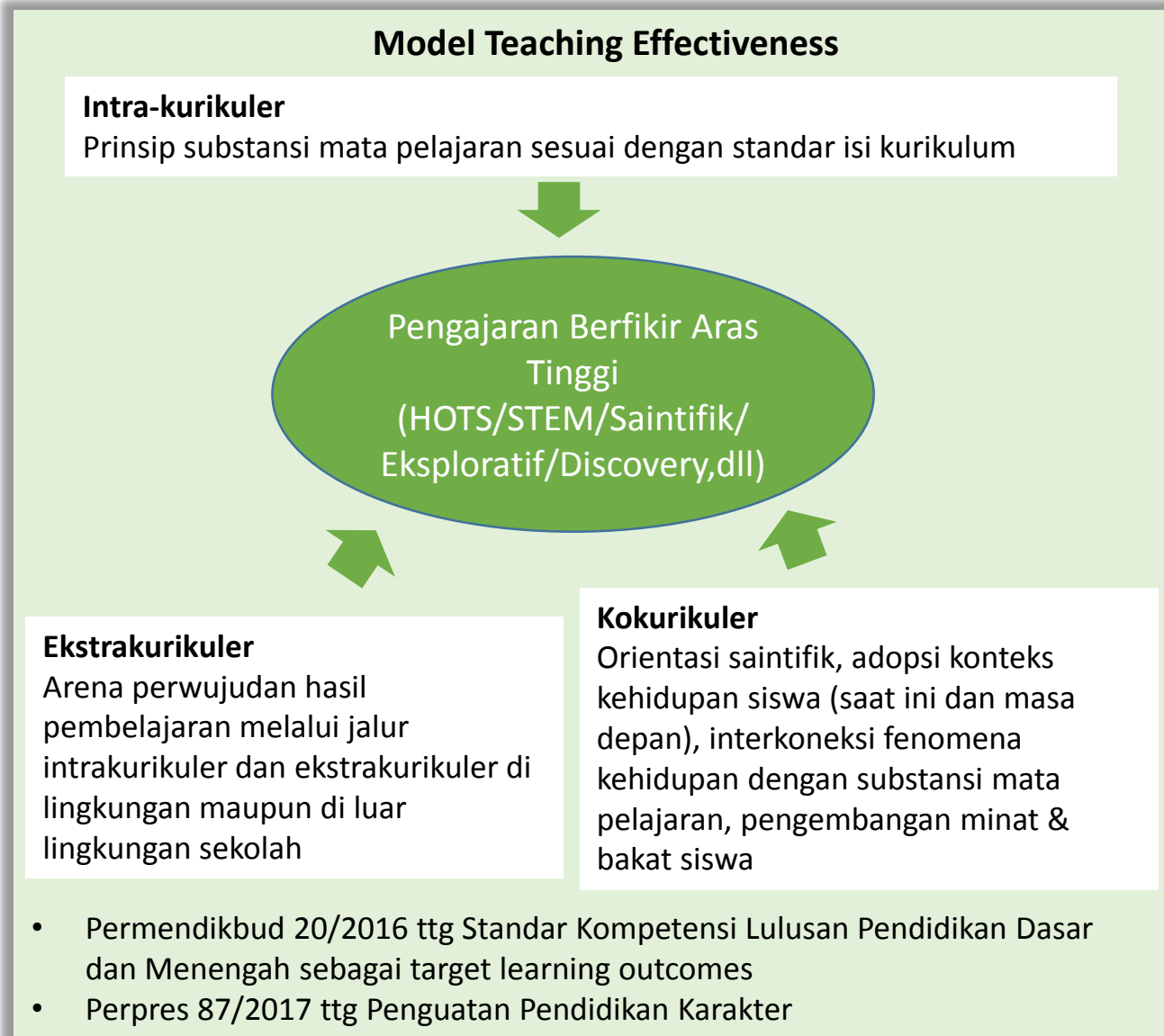
1. Calon guru (prajabatan)



2. Sudah Guru (Dalam Jabatan)

Peningkatan Kompetensi:

Fokus ke peningkatan pembelajaran



Industry 4.0



Globalisasi

Learning Outcome:

1. Karakter kuat
2. Multi-kecakapan abad 21 & bersertifikat
3. Elastis & Pembelajar sepanjang hayat
4. Inovatif & Entrepreneur
5. Global Citizens



Generasi Z



Isu Nasional



03

NERACA PENDIDIKAN DAERAH

- **KAB. KEBUMEN,**
- **KOTA YOGYAKARTA,**
- **KAB GORONTALO**

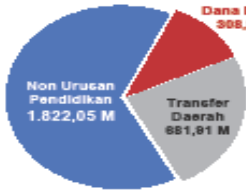
NERACA PENDIDIKAN DAERAH 2018



KAB. KEBUMEN JAWA TENGAH

KAB. KEBUMEN

PENDANAAN PENDIDIKAN APBD 2018: Rp2.812,90 M



Tren Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan di Luar Transfer Daerah (APBD Murni)



Sumber: Kemendagri, November 2018

Rincian Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan

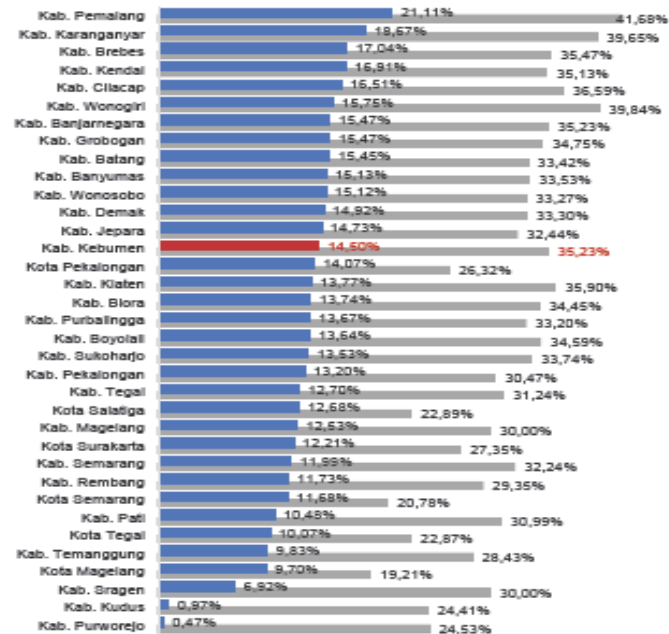
DAK Fisik	13,17 M
TPG	266,43 M
Tamsil	2,10 M
Tunjangan Khusus Guru	1,06 M
DAU (Gaji GTK PNSD)	377,59 M
BOP PAUD	21,57 M

Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah (APBN)

PAUD-DIKMAS	2,69 M
TPG	4,41 M
SMP	1,28 M
GTK	1,64 M
Kebudayaan	0,00 M
Total	10,02 M

Sumber: Kemendikbud, Oktober 2018

ANGGARAN URUSAN PENDIDIKAN



Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan di Luar Transfer Daerah (APBD Murni)

Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan dengan Transfer Daerah

Sumber: Kemendagri, November 2018

IPM 2017



Kab. 68,29
Prov. 70,52
Nas. 70,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, September 2018

DATA PENDIDIKAN DAERAH

SATUAN PENDIDIKAN	2.725	PENDIDIK	11.644
PAUD	1.712	PAUD	1.095
SD	802	SD	5.830
SMP	115	SMP	2.179
SMA	24	SMA	649
SMK	66	SMK	1.813
SLB	6	SLB	78
PESERTA DIDIK	239.018	RUANG KELAS	9.875
PAUD	34.722	PAUD	1.595
SD	111.669	SD	5.207
SMP	42.959	SMP	1.525
SMA	11.003	SMA	390
SMK	38.005	SMK	1.096
SLB	660	SLB	62
TENDIK	3.204	ROMBEL	8.236
SD	1.432	SD	5.180
SMP	875	SMP	1.459
SMA	280	SMA	369
SMK	617	SMK	1.228

Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

DATA RASIO PENDIDIKAN

GURU:SISWA	SD	SMP	SMA	SMK	GURU PNS:SISWA	SD	SMP	SMA	SMK
1:19	1:20	1:17	1:21	1:31	1:31	1:32	1:29	1:130	1:130
ROMBEL:SISWA	SD	SMP	SMA	SMK	RUANG KELAS:ROMBEL	SD	SMP	SMA	SMK
1:22	1:29	1:30	1:31	1:31	1:1	1:1	1:0,9	1:1,1	1:1,1

Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

PROGRAM INDONESIA PINTAR

	SD	SMP	SMA	SMK
Anggaran (dalam jutaan rupiah)	21.152	13.670	2.192	16.755
Penerima (dalam jutaan rupiah)	51.661	22.245	2.687	20.411

Sumber: Ditjen. Pendidikan, November 2018

KEBUDAYAAN

JENIS	JUMLAH
Cagar Budaya	1
Desa Adat	0
Museum	0
Rumah Budaya Nusantara	0
Sanggar dan Komunitas	0

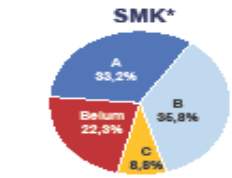
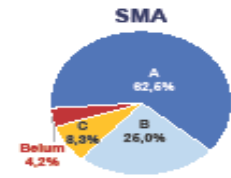
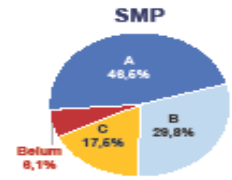
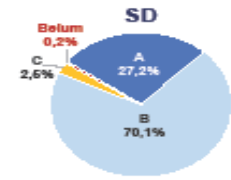
Sumber: Ditjen. Kebudayaan, November 2018

BAHASA DAERAH

1

Sumber: Badan Bahasa, September 2018

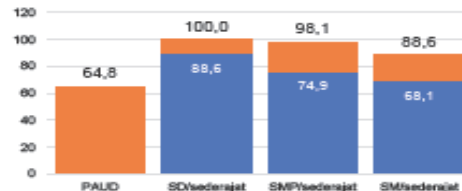
AKREDITASI SEKOLAH



Sumber: BAN SD, November 2018

*Data akreditasi SMK, dihitung berdasarkan Program Keahlian

APK DAN APM 2017/2018 (persentase)



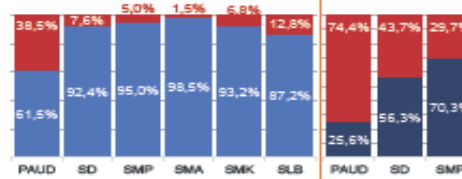
Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

SISWA PUTUS SEKOLAH DAN MENGULANG

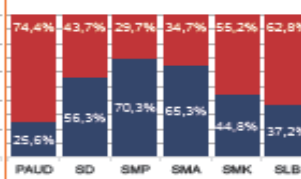
	SD	SMP	SMA	SMK
PUTUS SEKOLAH	178	95	21	327
MENGULANG	2.733	36	6	60

Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

KUALIFIKASI GURU

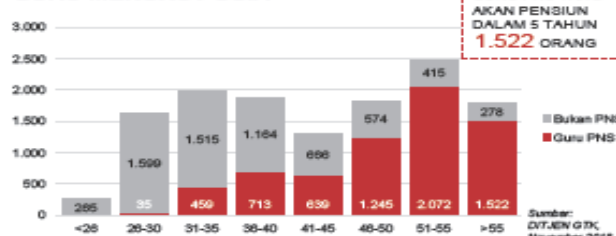


GURU TERSERTIFIKASI



Sumber: Ditjen. GTK, November 2018

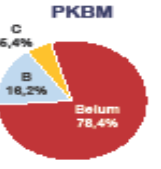
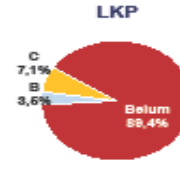
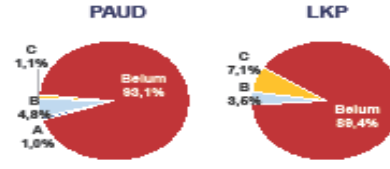
GURU MENURUT USIA



GURU PNS YANG AKAN PENSIUN DALAM 5 TAHUN 1.522 ORANG

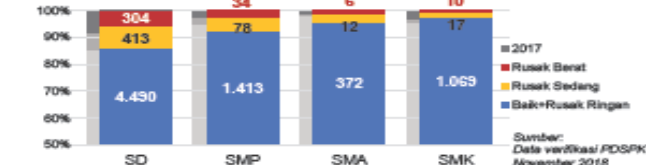
Sumber: Ditjen. GTK, November 2018

AKREDITASI PAUD DAN PNF



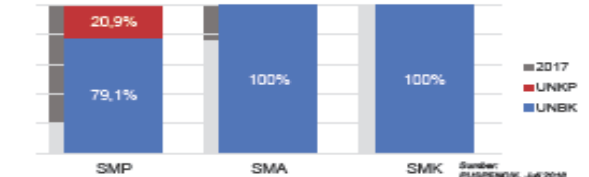
Sumber: BAN PAUD dan PNF, November 2018

KONDISI RUANG KELAS



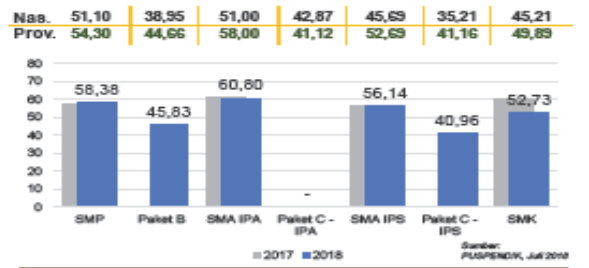
Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

PELAKSANAAN UNBK



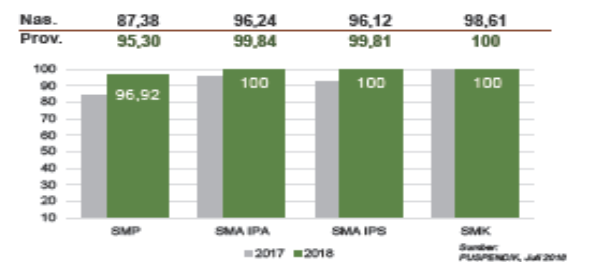
Sumber: PUSPENK, Juli 2018

HASIL UJIAN NASIONAL



Sumber: PUSPENK, Juli 2018

INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL



Sumber: PUSPENK, Juli 2018

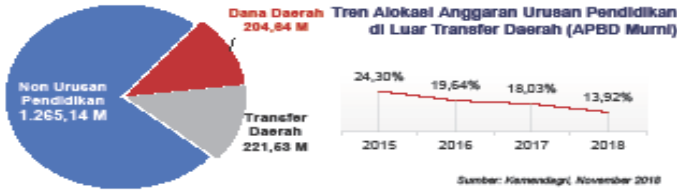
Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Telepon 021-5711144
Desember 2018

NERACA PENDIDIKAN DAERAH 2018



KOTA YOGYAKARTA D.I. YOGYAKARTA

PENDANAAN PENDIDIKAN APBD 2018: Rp1.691,31 M



Rincian Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan

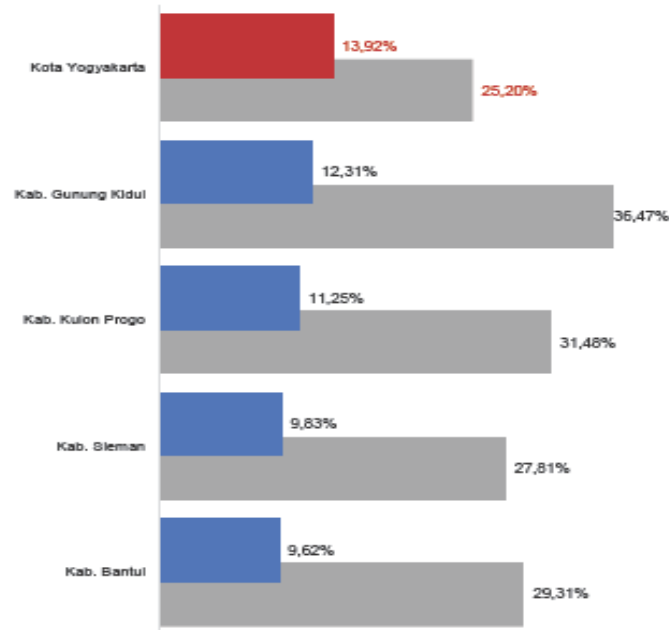
DAK Fisik	0,00 M
TPG	89,89 M
Tamisi	0,37 M
Tunjangan Khusus Guru	0,00 M
DAU (Gaji GTK PNSD)	118,14 M
BOP PAUD	13,13 M

Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah (APBN)

PAUD-DIKMAS	2,37 M
SD	0,32 M
SMP	0,15 M
GTK	0,00 M
Kebudayaan	1,00 M
Total	3,84 M

Sumber: Kemendikbud, Oktober 2018

ANGGARAN URUSAN PENDIDIKAN



IPM 2017



DATA PENDIDIKAN DAERAH

SATUAN PENDIDIKAN	1.116	PENDIDIK	6.578
PAUD	810	PAUD	757
SD	165	SD	2.099
SMP	59	SMP	1.242
SMA	43	SMA	1.127
SMK	30	SMK	1.180
SLB	9	SLB	173
PESERTA DIDIK	115.850	RUANG KELAS	4.620
PAUD	18.750	PAUD	766
SD	42.057	SD	1.708
SMP	20.597	SMP	756
SMA	16.949	SMA	661
SMK	16.916	SMK	551
SLB	581	SLB	178
TENDIK	2.115	ROMBEL	3.620
SD	710	SD	1.674
SMP	499	SMP	703
SMA	499	SMA	609
SMK	407	SMK	634

Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

DATA RASIO PENDIDIKAN

GURU:SISWA				GURU PNS:SISWA			
SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
1 : 20	1 : 17	1 : 15	1 : 14	1 : 64	1 : 40	1 : 36	1 : 28
ROMBEL:SISWA				RUANG KELAS:ROMBEL			
SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
1 : 26	1 : 28	1 : 28	1 : 27	1 : 1	1 : 0,9	1 : 0,9	1 : 1,2

Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

PROGRAM INDONESIA PINTAR

	SD	SMP	SMA	SMK
Anggaran (dalam jutaan rupiah)	3.240	2.583	879	4.527
Penerima (dalam jutaan)	7.922	4.301	1.045	5.564

Sumber: Ditjen. Dikdasmen, November 2018

KEBUDAYAAN

JENIS	JUMLAH
Cagar Budaya	388
Desa Adat	0
Museum	30
Rumah Budaya Nusantara	0
Sanggar dan Komunitas	0

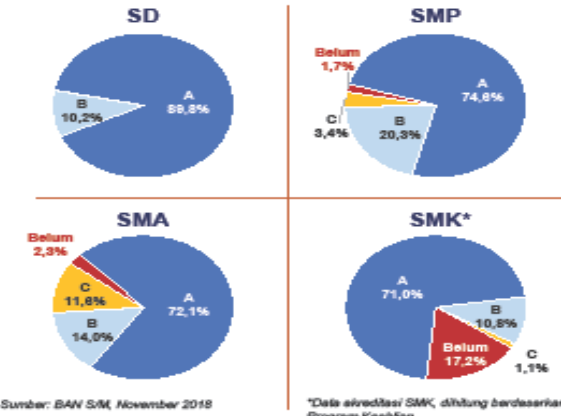
Sumber: Ditjen. Kebudayaan, November 2018

BAHASA DAERAH

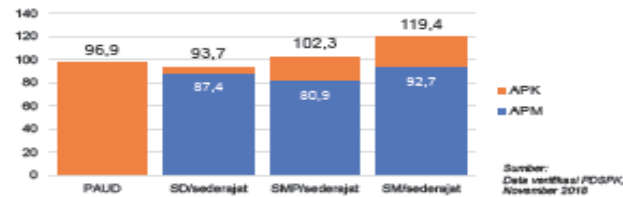
1

Sumber: Badan Bahasa, September 2019

AKREDITASI SEKOLAH



APK DAN APM 2017/2018 (persentase)

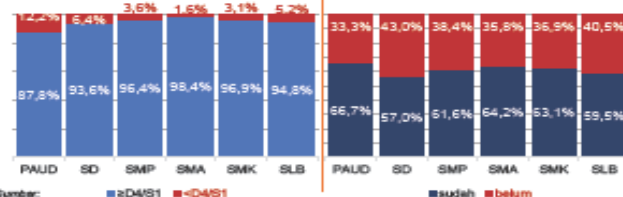


SISWA PUTUS SEKOLAH DAN MENGULANG

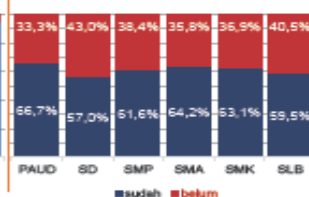
	SD	SMP	SMA	SMK
PUTUS SEKOLAH	24	56	28	178
MENGULANG	205	48	14	60

Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

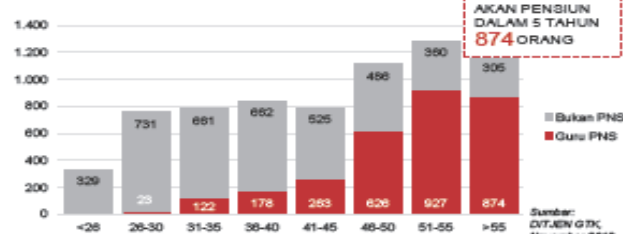
KUALIFIKASI GURU



GURU TERSERTIFIKASI

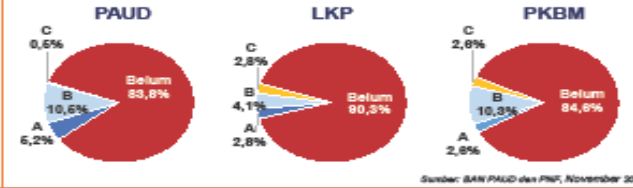


GURU MENURUT USIA

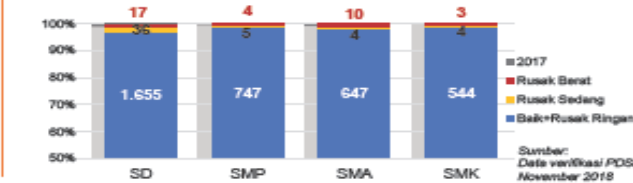


KOTA YOGYAKARTA

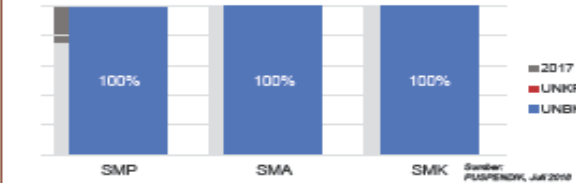
AKREDITASI PAUD DAN PNF



KONDISI RUANG KELAS



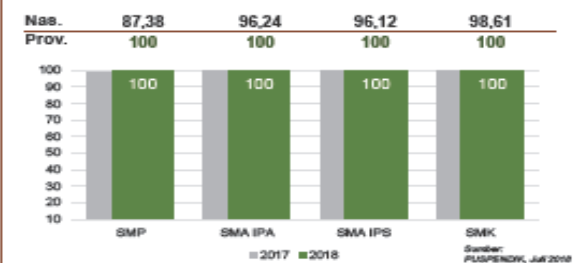
PELAKSANAAN UNBK



HASIL UJIAN NASIONAL



INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL

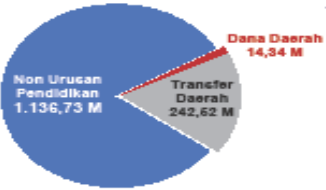


NERACA PENDIDIKAN DAERAH 2018



KAB. GORONTALO GORONTALO

PENDANAAN PENDIDIKAN APBD 2018: Rp1.393,59 M



Tren Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan di Luar Transfer Daerah (APBD Murni)



Sumber: Kemendikpr, November 2018

Rincian Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan

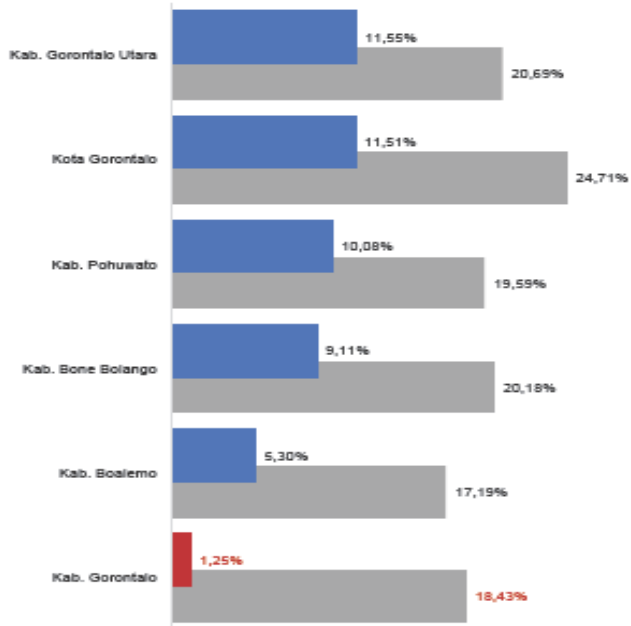
DAK Fisik	7,46 M
TPG	94,62 M
Tamsil	1,25 M
Tunjangan Khusus Guru	1,14 M
DAU (Gaji GTK PNSD)	128,64 M
BOP PAUD	9,40 M

Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah (APBN)

PAUD-DIKMAS	1,96 M
SD	3,67 M
SMP	0,00 M
GTK	0,50 M
Kebudayaan	0,00 M
Total	6,13 M

Sumber: Kemendikbud, Oktober 2018

ANGGARAN URUSAN PENDIDIKAN



■ Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan di Luar Transfer Daerah (APBD Murni)
■ Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan dengan Transfer Daerah

Sumber: Kemendikpr, November 2018

IPM 2017



Kab. 67,01
Prov. 67,01
Nas. 70,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, September 2018

DATA PENDIDIKAN DAERAH

SATUAN PENDIDIKAN	1.060	PENDIDIK	4.146
PAUD	602	PAUD	431
SD	298	SD	1.921
SMP	128	SMP	960
SMA	19	SMA	445
SMK	12	SMK	357
SLB	1	SLB	32
PESERTA DIDIK	84.825	RUANG KELAS	3.975
PAUD	14.461	PAUD	819
SD	40.029	SD	1.954
SMP	16.609	SMP	700
SMA	8.591	SMA	281
SMK	4.983	SMK	206
SLB	152	SLB	15
TENDIK	443	ROMBEL	3.118
SD	152	SD	1.935
SMP	148	SMP	686
SMA	89	SMA	293
SMK	54	SMK	204

Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

DATA RASIO PENDIDIKAN

GURU:SISWA	SD	SMP	SMA	SMK	GURU PNS:SISWA	SD	SMP	SMA	SMK
1:21	1:17	1:18	1:14	1:14	1:38	1:28	1:30	1:27	1:27
ROMBEL:SISWA	SD	SMP	SMA	SMK	RUANG KELAS:ROMBEL	SD	SMP	SMA	SMK
1:21	1:24	1:29	1:24	1:24	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

PROGRAM INDONESIA PINTAR

	SD	SMP	SMA	SMK
Anggaran (dalam jutaan)	7.360	5.687	2.641	2.425
Penerima (dalam jutaan)	18.155	9.136	3.174	3.005

Sumber: Ditjen. Pendidikan, November 2018

KEBUDAYAAN

JENIS	JUMLAH
Cagar Budaya	1
Desa Adat	0
Museum	0
Rumah Budaya Nusantara	1
Sanggar dan Komunitas	0

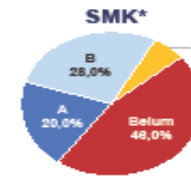
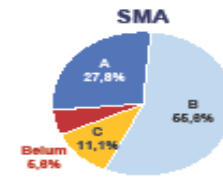
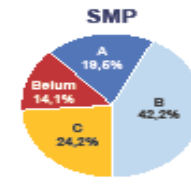
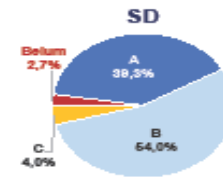
Sumber: Ditjen. Kebudayaan, November 2018

BAHASA DAERAH

2

Sumber: Badan Bahasa, September 2018

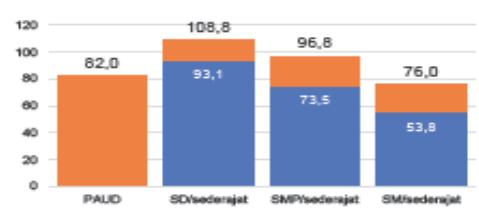
AKREDITASI SEKOLAH



Sumber: BAN SMK, November 2018

*Data akreditasi SMK, dihitung berdasarkan Program Keahlian

APK DAN APM 2017/2018 (persentase)



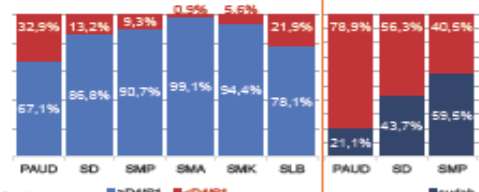
Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

SISWA PUTUS SEKOLAH DAN MENGULANG

	SD	SMP	SMA	SMK
PUTUS SEKOLAH	212	154	71	71
MENGULANG	1.744	154	49	4

Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

KUALIFIKASI GURU

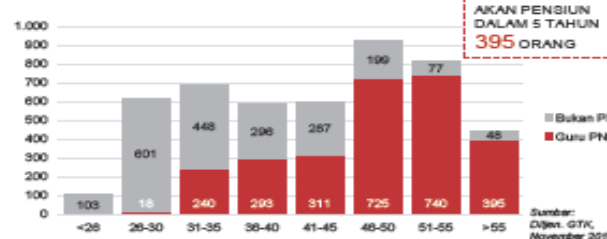


Sumber: Ditjen. GTK, November 2018

GURU TERSERTIFIKASI



GURU MENURUT USIA

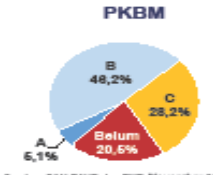
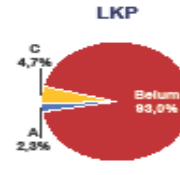
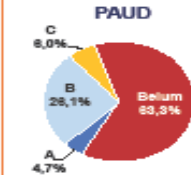


GURU PNS YANG AKAN PENSIUN DALAM 5 TAHUN 395 ORANG

Sumber: Ditjen. GTK, November 2018

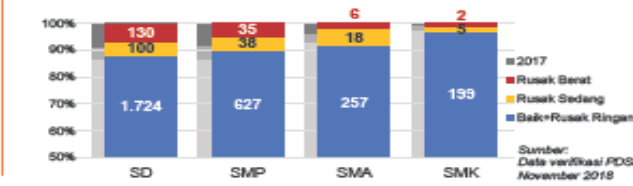
KAB. GORONTALO

AKREDITASI PAUD DAN PNF



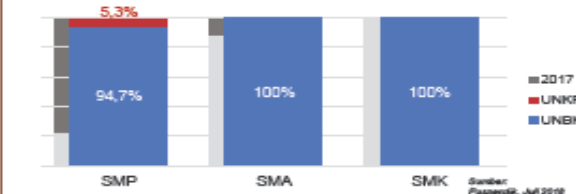
Sumber: BAN PAUD dan PNF, November 2018

KONDISI RUANG KELAS



Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

PELAKSANAAN UNBK



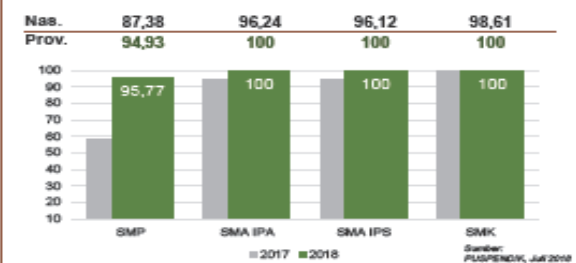
Sumber: PUSPENK, Juli 2018

HASIL UJIAN NASIONAL



Sumber: PUSPENK, Juli 2018

INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL



Sumber: PUSPENK, Juli 2018

Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Telepon 021-5711144
Desember 2018



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Terima kasih
IGLIW9 K92IU



Pemenuhan minimal 24 JTM dalam pelaksanaan pembelajaran
DIKECUALIKAN bagi:

- a. Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka, berdasarkan struktur kurikulum;
- b. Guru pendidikan khusus;
- c. Guru pendidikan layanan khusus; dan
- d. Guru pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).

Ketentuan beban kerja bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2018/2019.